

***PROBITY AUDIT* ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA:
TANTANGAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
DANA SEKTOR PUBLIK
(Studi Pada Inspektorat Kota Makassar)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Akuntansi
Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FIRDA UTAMA
90400114115

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN AKUNTANSI**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firda Utama

NIM : 90400114115

Tempat/Tgl. Lahir : Mamara, 12 Deseember 1997

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi & Bisnis Islam

Alamat : Jln. Mamoa 5c No.12

Judul : *Probit Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa: Tantangan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik (Studi Pada Inspektorat Kota Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2018

Penyusun,

FIRDA UTAMA
90400114115

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ***“Probit Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa: Tantangan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik (Studi Pada Inspektorat Kota Makassar)”***, yang disusun oleh **Firda Utama**, NIM: 90400114115, Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1439 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, September 2018

Muharram 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekertaris : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Munaqisy I : Prof. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
Munaqisy II : Memen Suwandi, SE., M.Si.
Pembimbing I : Mustakim Muchlis, S.E., M.Si.
Pembimbing II : Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kemampuan untuk berpikir yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan shalawat juga semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan sempurna bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang bermartabat.

Skripsi dengan judul **“*Probity Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa: Tantangan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik (Studi Pada Inspektorat Kota Makassar)”** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa memulai hingga mengakhiri proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, banyak rintangan, hambatan dan cobaan yang selalu menyertainya. Hanya dengan ketekunan dan kerja keraslah yang menjadi penggerak penulis dalam menyelesaikan segala proses tersebut. Dan juga karena adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Saliman dan ibunda Nasmiani yang telah memberikan dukungan materil dan non materil untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendukung, memotivasi dan tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah SWT demi kebahagiaan penulis. Dan juga kepada segenap keluarga besar yang selalu memberikan bantuan bagi penulis untuk bisa menyelesaikan studi. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
3. Bapak Jamaluddin Majid, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, serta Bapak Memen Suwandi, SE., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Mustakim Muchlis, SE., M.Si. Ak sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si. sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Andi Wawo, SE. Ak, selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihatnya.

6. Segenap dosen serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Inspektorat Kota Makassar yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat satu angkatan 2014 Akuntansi UIN Alauddin Makassar, khususnya kelas akuntansi C yang semenjak dari maba sampai sekarang, selalu memberi bantuan, dorongan, semangat, tempat berkeluh kesah, serta telah menjadi teman diskusi yang baik bagi penulis.
9. Teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 58 Desa Kalosi Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.
10. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Semoga skripsi yang penulis persembahkan ini dapat bermanfaat. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Penulis

Firda Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1-13
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	11
BAB II: TINJAUAN TEORETIS.....	14-35
A. Teori Peran	14
B. Audit Sektor Publik	16
C. Auditor Internal Pemerintah	18
D. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	22
E. Penyimpangan Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	25
F. <i>Probity Audit</i> atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	26
G. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik.....	31
H. Rerangka Pikir	33
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	36-43

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Instrumen Penelitian	40
F. Pengelolaan dan Analisis Data	41
G. Pengujian Keabsahan Data	42
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	43-7
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Audit Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Kota Makassar ..	53
C. <i>Probit Audit</i> atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik ..	60
D. Tantangan dalam Pelaksanaan <i>Probit Audit</i> atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	67
BAB V: PENUTUP	78-80
A. Kesimpulan	78
B. Implikasi Penelitian.....	79
C. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81-84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 : Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	51
Tabel 4.2 : Daftar Informan Penelitian	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Rerangka Pikir	35
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar	50



ABSTRAK

Nama : Firda Utama

Nim : 90400114115

Judul : *Probity Audit* atas Pengadaan Barang dan jasa: Tantangan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik (Studi Pada Inspektorat Kota Makassar)

Pengadaan Barang dan jasa di Indonesia merupakan kegiatan yang rawan dijadikan media untuk melakukan berbagai kecurangan, mengutip data laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (2016) yang menempatkan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sebagai Kasus terbanyak kedua yang ditangani setelah penyuapan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menerapkan pendekatan audit pengadaan barang dan jasa secara *real-time* yang disebut *Probity Audit*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai Audit Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, bagaimana pelaksanaan *probity audit* mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, serta tantangan yang di hadapi terkait audit tersebut.

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang mana pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, studi pustak, studi dokumentasi, dan *Internet searching*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada.

Hasil temuan dalam penelitian ini Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang di lakukan oleh Inspektorat Kota Makassar belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. *Probity Audit* atas pengadaan barang dan jasa dianggap mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, akan tetapi Inspektorat Kota Makassar belum melaksanakan pendekatan tersebut dikarenakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pemerintah.

Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa, *Probity Audit*, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan sebuah organisasi pemerintah dapat diukur dengan melihat perspektif pengelolaan keuangannya, yang mana pengelolaan keuangan daerah yang tepat dapat memberikan kepastian mengenai keberhasilan atau ketetapan suatu kegiatan sehingga pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya (Ruspina, 2013; dalam Yang dan Suartana, 2017). Adanya pengelolaan keuangan daerah yang tepat dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan dalam instansi pemerintah. Ristanti, dkk (2014) menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bagian dari agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good clean governance*), meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supermasi hukum, bervisi strategis (*United Nation Development Program*; dalam Mardiasmo, 2004).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan kedudukan audit internal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam konteks pengawasan. Ketetapan tersebut

menyatakan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern yaitu inspektorat jenderal departemen, unit pengawasan lembaga pemerintah non departemen, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Dengan demikian, secara luas inspektorat daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai auditor internal yang bekerja dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Inspektorat daerah merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga dapat dikatakan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di daerah. Namun, selama ini posisi inspektorat daerah lemah dan menjadi legitimasi kepala daerah untuk kerja-kerjanya (Taufik, 2011).

Praktek kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang sering terjadi, merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Penyebab terjadinya kecurangan menurut *KPMG Fraud, bribery and Corruption Survey* 2013 yang dilakukan di Australidan New Zealand tahun 2012 adalah lemahnya pengendalian intern yaitu sebesar 28% responden, faktor kedua adalah mengesampingkan sistem pengendalian intern yang telah ada yaitu sebesar 19%. Sedangkan 42% kecurangan terdeteksi sebagian besar karena adanya pengendalian intern (KPMG, 2013; dalam Nurhasanah, 2016). Hal ini membuktikan keberadaan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern sangatlah penting untuk mengurangi *fraud*. Pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta

untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (Hadi dkk, 2017). Sejalan dengan itu, organisasi yang memiliki fungsi audit internal akan lebih dapat mendeteksi dan mengurangi kesempatan kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*) (Hogan *et al.* 2008).

Penyimpangan atau kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan baik oleh manajemen puncak maupun pegawai lainnya untuk mendapatkan keuntungan secara tidak beretika dengan cara melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti korupsi, kolusi, penipuan, dan lain sebagainya (Santoso dan Pambelum, 2008). Di dalam Al-Qur'an perilaku curang sangat dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Muthaffifin/83:1) yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Terjemahnya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Q.S Al-Muthaffifin/83:1).”

Pada surah Al-Muthaffifin ayat 1, yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dengan demikian, perbuatan curang dalam hal ini dapat diartikan jika seseorang menuntut hak-haknya untuk dipenuhi dan mengurangi kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam lingkup pemerintahan, kecurangan sering kali terjadi, yang mana dilakukan oleh aparat pemerintah dengan menyalahgunakan hak publik yang dikuasakan kepada mereka demi mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan ini jelas sangat dilarang, karena dapat merugikan berbagai pihak khususnya masyarakat.

Pengadaan Barang/jasa menjadi salah satu penyumbang terbesar tindak pidana korupsi dalam sektor publik. Pengadaan barang dan jasa di Indonesia merupakan kegiatan yang rawan dijadikan media untuk melakukan berbagai kecurangan, mengutip data laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (2016) yang menempatkan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sebagai kasus terbanyak kedua yang ditangani Komisi setelah kasus penyuapan. Salah satu kasus Pengadaan Barang/Jasa, terjadi pada lingkup Pemerintah Kota Makassar. Dilansir dari Kompas.com (2018), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Makassar mengenai Pengadaan barang/jasa yakni proyek Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pengadaan 5.000 pohon ketapang. Menurut Purwanto, dkk dalam KPK (2012), secara konvensional, persoalan-persoalan yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh enam hal yaitu: (1) Minimnya monitoring; (2) Penyalahgunaan wewenang; (3) Penyimpangan Kontrak; (4) Kolusi antara Pejabat Publik dan Rekanan; (5) Manipulasi dan tidak transparan; dan (6) Kelemahan Sumber daya Manusia.

Penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa dapat dipengaruhi oleh pengetahuan peraturan dari pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa (Juliani, 2014). Oleh karena itu, semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena kegiatan yang dilaksanakan tanpa mengikuti aturan yang berlaku akan menjadi temuan dan menjadi masalah bagi SKPD. Dalam upaya memperoleh barang dan jasa

harus dilakukan secara transparan melalui persaingan sehat, terbuka dan adil sehingga dapat tercapai efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (BPKP, 2012). Lebih lanjut, Putra, dkk (2015) menyatakan bahwa setiap pengadaan barang/jasa harus terdapat pengendalian intern untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumberdaya suatu organisasi, serta mencegah dan menemukan ketidaksesuaian prosedur.

Menjaga ketaatan pada sistem dan prosedur pengadaan, serta dilakukannya penilaian risiko dalam pengadaan barang/jasa sangatlah penting guna meminimalisir *fraud* pada pengadaan barang/jasa (Nurharjanti, 2017). Akan tetapi, juga diperlukan peningkatan kompetensi para auditor internal juga komitmen dari pimpinan dan berbagai unsur dalam pemerintahan di daerah. Percuma seribu auditor internal dalam pemerintahan, peraturan perundangan dikeluarkan, Satgas pengendalian internal dibentuk bila tidak ada komitmen nyata dari pemerintah untuk mendukung upaya-upaya meminimalisasi *fraud* di daerah (Gamar dan Jhamhuri, 2015). Tindakan *fraud* dapat dicegah dengan cara menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisasi kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*. Oleh karena itu dalam lingkungan Inspektorat hendaknya perlu diidentifikasi gejala-gejala dari tindakan *fraud*, penilaian secara berkala atas gejala tersebut serta upaya untuk mengeliminasinya.

Pemerintah telah melakukan berbagai hal untuk mencegah korupsi di bidang pengadaan, diantaranya membuat struktur organisasi pengadaaan dan

mendesain pengadaan berbasis elektronik (Wibowo, 2015). Selain itu, upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menerapkan pendekatan audit pengadaan barang dan jasa secara *real-time* yang disebut *probity audit*. Chew dan Ryan (2002) mengemukakan bahwa pelaksanaan *Probity Audit* dapat meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah.

Probity Audit diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-362 /K/D4/2012 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). *Probity Audit* utamanya di lakukan terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis (melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pelayanan dasar masyarakat, dan terkait dengan isu politis). Teknik *probity audit* yang lebih di utamakan adalah peninjauan fisik, observasi, diskusi, dan wawancara tanpa mengesampingkan teknik-teknik audit yang lainnya (BPKP, 2012). Dampak yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip-prinsip *probity* diantaranya menghindari konflik dan permasalahan, menghindari praktek korupsi, memberikan keyakinan secara objektif dan independen atas kejujuran (*probity*) proses pengadaan barang/jasa, serta meminimalkan potensi adanya litigasi atau permasalahan hukum (BPKP, 2012).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 76 menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pengawasan

melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, evaluasi, dan/ atau penyelenggaraan *whistleblowing system*. Pengawasan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ialah sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. Salim (2016) menyatakan bahwa Komitmen aparaturnya pengadaan maupun peran auditor internal sangat penting dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sehat. Oleh karena itu, peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat diharapkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (Diani dan Narsa, 2017).

Pedoman *Probit Audit* atas Pengadaan barang dan jasa merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintah yang baik. Akan tetapi, Komitmen untuk menerapkan pendekatan baru *probit audit* belum sepenuhnya dilakukan oleh inspektorat di beberapa daerah, salah satunya yaitu Kota Makassar. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan *Probit Audit* atas Pengadaan barang/jasa, dengan mengangkat judul **“*Probit Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa: Tantangan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik (Studi Pada Inspektorat Kota Makassar)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu Pelaksanaan Audit atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar, serta tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan *Probit Audit*

atas Pengadaan Barang dan Jasa. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan dengan secara mendalam yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang bagaimana Pelaksanaan Audit Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar, sejauh mana pelaksanaan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana pemerintah, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *Probity Audit*, serta bagaimana pelaksanaan *Probity Audit* tersebut yang mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Informan dalam penelitian ini yaitu Auditor yang terlibat dalam pelaksanaan Audit Pengadaan barang dan jasa, dan memiliki pemahaman mengenai *Probity Audit* pada Inspektorat Kota Makassar. Peneliti juga akan mengumpulkan data atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian, serta didukung dengan telaah literatur secara mendalam pula. Tujuan fokus penelitian ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ingin mengetahui tantangan pelaksanaan *probity audit* yang hadapi oleh Inspektorat Kota Makassar selaku auditor internal atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dengan mengacu pada Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam *Prevent*, *Deter* dan *Detect* sebagai *Early Warning System* atas pengadaan barang dan jasa; serta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara

melalui pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar?
2. Bagaimana Pelaksanaan *Probity Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa, mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik apabila dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar?
3. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Makassar terkait Pelaksanaan *Probity Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pelaksanaan Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar.
2. Mengetahui Pelaksanaan *Probity Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik apabila dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar.
3. Mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Makassar terkait Pelaksanaan *Probity Audit* atas Pengadaan Barang/Jasa.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang *auditing* terkait dengan *Probity Audit* atas pengadaan barang dan jasa, yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah guna mengatasi penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan dengan demikian dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Berdasarkan *Role Theory* (Teori Peran) yang dicetuskan oleh Robert Linton, Glen Elder dan B.J. Biddle, Peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Inspektorat selaku auditor internal pemerintah harus mampu berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi Pengawas Internal Pemerintah, khususnya Inspektorat Kota Makassar dalam mengevaluasi pelaksanaan Audit atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, serta meningkatkan pengawasan yang dilakukan dengan melaksanakan *Probity Audit* atas Pengadaan barang dan Jasa. Peran Inspektorat kota sangat di perlukan dalam melakukan pengawasan, audit, review, evaluasi, pemantauan melalui *probity audit* sehingga dapat

tercapai efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabel).

F. *Kajian Pustaka*

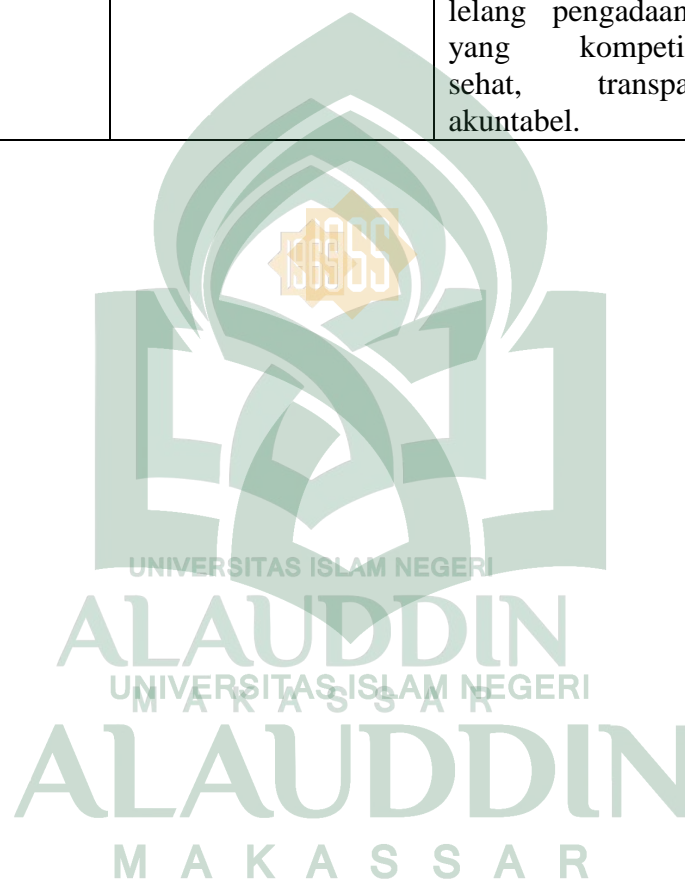
Penelitian ini merupakan penelitian tentang pelaksanaan *Probit Audit* atas pengadaan barang dan jasa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Untuk menunjang kajian teoretis pada penelitian ini, maka penulis menambahkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan topik penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai topik dan objek penelitian yang akan diteliti. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Bae dan Utami (2017)	Analisis Penerapan <i>Probit Audit</i> dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<i>Probit audit</i> diperlukan dan <i>probit audit</i> terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. <i>Probit audit</i> yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER-362/K/ D4/ 2012.
Fuddloilulhaq dan Usman (2017)	Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan probity audit pada BPKP Pusat dengan Pedoman <i>Probit</i>	Pelaksanaan <i>probit audit</i> yang dilakukan oleh BPKP Pusat sudah dilaksanakan secara memadai, namun masih terdapat hal yang belum sesuai

	<i>Audit</i> Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	dengan kriteria terutama dalam kegiatan penentuan ruang lingkup audit, penyusunan kertas kerja dan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit.
Dwipayani,dkk (2017)	Evaluasi Pelaksanaan <i>Probit Audit</i> dalam Meminimalkan Risiko Penyimpangan Pengadaan Barang/ Jasa (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Gianyar)	<i>Probit Audit</i> di lakukan secara <i>Real Time</i> selama proses pengadaan barang/ jasa yang dimulai dari tahap perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Selanjutnya tim <i>probit Audit</i> memberikan pendampingan Pada Dinas PU dan PPK dalam Pelaksanaan Kontruksi pembangunan yang berimplikasi dan meminimalkan terjadinya kesalahan saat pelaksanaan pembangunan. Kendaala yang dihadapi oleh auditor dalam pelaksanaan <i>Probit Audit</i> yaitu kendala dalam penentuan harga perkiraan sendiri, kendala pada tahap pelaksanaan, dan kendala pada koordinasi. Adapun cara yang diterapkan dalam mengatasi permasalahan atau kendala yang terjadi yaitu dengan melakukan rapat atau diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil diskusi yang telah disepakati itu kemudian dicantumkan dalam laporan <i>probit audit</i> .
Primahadi dan Yudanti (2015)	Analisis Perbedaan Tingkat Penyimpangan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Instansi yang Menerapkan dan Tidak Menerapkan <i>Probit Audit</i> .	Terdapat perbedaan tingkat penyimpangan pengadaan barang/ jasa yang signifikan pada instansi yang menerapkan <i>Probit Audit</i> dengan Instansi yang tidak Menerapkan <i>Porbity Audit</i> .
Chew dan Ryan (2001)	<i>The Practice of Probit Audits In One</i>	Konsep <i>Probit Audit</i> belum sepenuhnya didefinisikan

	<p><i>Australian Audits In One Australian Jurisdiction.</i></p>	<p>dengan baik, beberapa responden mengalami kesulitan dalam membedakannya dengan audit internal. Pelaksanaan <i>probit audit</i> yang sebagian besar dilaksanakan secara <i>real time</i> telah mampu memberikan kontribusi khususnya yang berkaitan dengan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses lelang pengadaan barang/jasa yang kompetitif/persaingan sehat, transparan, dan akuntabel.</p>
--	---	--



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Role Theory (Teori Peran)*

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu (Barbara, 1995: 21 dalam Lia, 2009). Peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Setiap peran sosial adalah sekumpulan hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku yang harus dihadapi dan dipenuhi seseorang (Michener, 1999; dalam Sesen, 2015). Dengan demikian, peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat.

Role Theory mengacu pada perspektif perilaku dengan memusatkan perhatian pada penjelasan interaksi sosial sebagai perilaku yang berhubungan dengan posisi sosial tertentu (Biddle, 1979; dalam Broderick, 1998). Dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan - harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya (Barbara, 1995; dalam Lia, 2009). Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

Masyarakat mempunyai harapan terhadap para pemegang peranan apakah mewakili organisasi atau institusi tertentu selaras dengan kewajiban dan tanggungjawabnya. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, peranan diartikan berfungsinya Inspektorat di Pemerintahan Kota Makassar yang secara sengaja dibentuk oleh pemerintah sebagai audit internal. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah harus mampu berperan dan berkontribusi dalam mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang rentan akan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) harus diawasi oleh peran APIP yang efektif dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan.

Melalui *Probit Audit* atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diharapkan dapat mendorong peran dan fungsi APIP dalam *Prevent, Deter* dan *Detect* sebagai *Early Warning System* atas pengadaan barang dan jasa; serta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara melalui pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (BPKP, 2012).

B. Audit Sektor Publik

Jenis audit sesuai Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara adalah (1) audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan; (2) audit kinerja, audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas; dan (3) audit dengan tujuan tertentu, audit yang tidak termasuk dalam kedua jenis audit tersebut yang meliputi antara lain audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif dan

audit atas sistem pengendalian intern pemerintah. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (BPK RI, 2017). Sejalan dengan itu, Susilawati dan Atmawinata (2014) juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah dalam melakukan penyimpangan penggunaan anggaran.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, mengenai Manfaat Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, antara lain melalui:

- a. penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya kesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan, berdasarkan bukti yang cukup dan tepat;
- b. peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif;
- c. peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- d. penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian dalam pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti,

serta berupa pencegahan dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara;

- e. negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. peningkatan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
- g. peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara.

Pujiono dan Jati (2007) menyatakan bahwa dalam melaksanakan audit di sektor publik (pemerintahan) perlu pembentukan suatu lembaga audit yang independen yang benar-benar mempunyai integritas yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak publik. Oleh karenanya lembaga auditor tersebut setidaknya bernaung di bawah lembaga legislatif negara ataupun merupakan lembaga profesional independen yang keberadaannya mandiri, seperti akuntan publik. Dan kemudian, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melaksanakan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, dan akuntan publik yang memeriksa keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang relevan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak, dan produk hukum lainnya yang berpengaruh langsung dan material terhadap hal pokok/informasi hal pokok yang diperiksa (BPK RI, 2017). Pengaruh langsung dan material dapat berupa:

1. hal yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan;

2. hal yang menyebabkan penyimpangan kinerja terkait aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas;
3. hal yang menyebabkan kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi; dan/atau
4. hal yang menyebabkan potensi kerugian negara/daerah dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.

C. Auditor Internal Pemerintah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku auditor internal adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para auditor tersebut, mempunyai peran dalam mencegah adanya kecurangan dalam instansi pemerintah guna mewujudkan tatakelolah pemerintahan yang baik. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 42, Allah berfirman sebagai berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah/2:42)

Surah Al-Baqarah ayat 42 menjelaskan bahwa kita sebagai Hamba Allah yang mengetahui tentang yang benar dan salah, diperintahkan untuk tidak melakukan serta menyembunyikan sesuatu yang bahkan kita tahu bahwa hal tersebut akan merugikan orang lain. Dalam hal ini, auditor dituntut untuk menjaga kejujuran dan kebenaran dalam dirinya, karena memiliki tanggung jawab atas kepentingan publik. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah selaku auditor harus mampu memeriksa dan mengawasi jalannya suatu program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota/daerah, dan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut dengan sebenar-benarnya.

Khusus untuk pejabat pengawas pemerintah Inspektorat, dasar hukum pemeriksaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciri utama auditor internal adalah kesediaannya untuk menerima tanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani, oleh karena itu mereka perlu memelihara standar perilaku yang tinggi dan memiliki standar praktik atas pelaksanaan pekerjaan yang handal (Haikal, 2014).

Mardiasmo (2005) dalam Hadi (2017) menyebutkan bahwa sebagai auditor internal pemerintah Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) hal yaitu: (1) Pengawasan yang dimaksud dapat berupa

pencegahan terhadap kesalahan pelaporan dan pertanggungjawaban, pencegahan terhadap kelalaian pegawai daerah dalam melaksanakan sistem dan prosedur, pencegahan terhadap terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat SKPD serta mencegah penggelapan maupun korupsi yang terjadi di daerah; (2) Pemeriksaan yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan bukti terkait dengan transaksi yang telah terjadi dan menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan; (3) Pembinaan yaitu memberikan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan yang benar menurut aturan perundangan yang berlaku yang sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi.

Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, yaitu komunikasi, sumber daya, dan disposisi (Setiawan dan Putro, 2013). Sejalan dengan itu, Menurut Soelendro (2000) dalam Ulum (2009), terdapat beberapa hal dibawah ini yang harus dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah agar dapat mengoptimalkan perannya dalam pelaksanaan *Good Governance*, yaitu:

1. Faktor Kelembagaan Pengawasan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas masing-masing *top management*. Namun, apakah dengan jumlah lembaga-lembaga pengawasan yang cukup banyak dan pelaksanaan pengawasan yang berlapis-lapis dapat diperoleh hasil pengawasan yang efektif? Apabila terungkap pula bahwa keberadaan lembaga-lembaga tersebut semakin mengganggu auditan, yaitu dengan

semakin banyaknya waktu yang harus disediakan hanya untuk melayani aparat pengawasan. Hal-hal seperti inilah yang harus dipikirkan dan dicarikan solusinya untuk kepentingan yang luas.

2. Koordinasi Pengawasan

Koordinasi Pengawasan sangat diperlukan dalam upaya mendukung pelaksanaan *good governance* secara keseluruhan, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi yang melekat pada diri lembaga pengawas dan menghasilkan produk pengawasan yang utuh atas kinerja pemerintah. Produk pengawasan ini akan dapat membantu, baik pemerintah maupun DPR dalam pelaksanaan *good governance* dan tugas-tugas yang diemban dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

3. Fungsi Kelembagaan Pengawasan

Peran Auditor Internal yang harus dilakukan saat sekarang ini tidak hanya sebagai “*watch dog*”, melainkan juga harus ikut mempercepat pembaruan manajemen pemerintah yang mengarah pada *good governance*.

4. Pengawasan Keuangan Pusat dan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pemerintah menciptakan aparat pengawasan dilingkungan pemerintahan, yaitu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah(APIP). Keberadaan APIP yang berlapis-lapis dan berjenjang dapat menimbulkan tumpang-tindih pemeriksaan baik antara APIP sendiri maupun antara APIP dan BPK, yang dapat menimbulkan inefisiensi, untuk itu perlu adanya pengawasan keuangan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 11 menyebutkan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif sebagaimana sekurang-kurangnya harus: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

D. *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018, yang mana pasal 1 berbunyi “Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa”. Menurut Yahya dan susanti (2012), ada empat komponen penting yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, yaitu:

1. Pengadaan Barang

Barang dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan, dan makhluk hidup.

2. Pengadaan Pekerjaan atau Kontruksi

Pengadaan pekerjaan atau kontruksi suatu bangunan meliputi pembangunan utuh atau keseluruhan, bisa juga sebagian saja. Pada dasarnya, pengadaan pekerjaan atau kontruksi ini dibagi menjadi dua yaitu: (a) Pelaksanaan Konstruksi bangunan meliputi keseluruhan atau sebagian kegiatan arsitektur, sipil, mekanik, elektrik, dan tata lingkungan; (b) Pembangunan fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian bangunan, seperti: Konstruksi bangunan alat transportasi, pembukaan lahan, pekerjaan penghancuran dan pembersihan, dan penghijauan taman kota, provinsi atau nasional.

3. Pengadaan Jasa Konsultasi

Pengadaan jasa konsultasi yang dimaksud adalah jasa layanan profesional dari perseorangan atau lembaga yang memiliki keahlian tertentu dalam berbagai bidang keilmuan. Jasa konsultasi ini mengutamakan pemikiran atau pola pikir yang akan dilakukan untuk menunjang kinerja instansi K/L/D/I dan instansi lain milik pemerintah, misalnya jasa rekayasa dan jasa perencanaan.

Dalam Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, terdapat beberapa metode pengadaan, yaitu: (Yahya dan Susanti, 2012)

1. Metode swakelola, yaitu dikelola sendiri oleh instansi pemerintah terkait tanpa melibatkan pihak luar
2. Seleksi, dilakukan seleksi terhadap para rekanan yang dianggap mampu untuk menangani pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut

3. Penunjukkan langsung, rekanan atau kontraktor ditunjuk secara langsung oleh instansi pemerintah yang sedang mengadakan barang dan jasa tertentu.
4. Lelang, merupakan sarana untuk memilih kontraktor atau rekanan diantara beberapa yang menawarkan diri setelah melihat pengumuman oleh instansi terkait.
5. Sayembara atau kontes, dilakukan dengan mengadakan pengumuman terbuka untuk ikut serta dalam sayembara atau kontes yang diadakan oleh instansi pemerintah berkaitan dengan penyerapan ide dan hasil barang jadi.

Dari beberapa metode pencarian rekanan untuk pengadaan barang dan jasa tersebut, beberapa pihak yang terkait dengan pengadaan, yaitu: Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, serta Penyedia Barang dan/atau Jasa (Rekanan/Kontraktor).

E. Penyimpangan Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Praktik penyimpangan pengadaan barang/jasa hampir dijumpai di seluruh instansi pemerintah bahkan menjadi ladang korupsi, karena nilai anggarannya yang besar dan mendominasi pengeluaran belanja Negara. Sucahyo dkk, 2009; dalam Arsyad dkk, 2016 menyatakan bahwa sisi negatif yang ditimbulkan dalam pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi antara lain: Pertama suap untuk memenangkan tender; Kedua, proses tender tidak transparan; Ketiga, memenangkan perusahaan saudara; kerabat atau orang-

orang partai tertentu; Keempat, pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; dan Kelima, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang.

Jenis penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Primahadi dan Yudanti (2015) antara lain: penggelembungan/*mark-up* anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan, penentuan jadwal waktu yang tidak realistis, pemaketan pekerjaan yang direkayasa, panitia tidak memiliki integritas, memihak dan tidak transparan, dokumen administrasi tidak memenuhi syarat, evaluasi tidak sesuai kriteria/kriteria cacat, pekerjaan fiktif, hasil pekerjaan tidak tepat jumlah, mutu dan waktu, dan lain sebagainya. Menurut Purwanto, dkk dalam KPK (2012), secara konvensional, persoalan-persoalan yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh enam hal yaitu: (1) Minimnya monitoring; (2) Penyalahgunaan wewenang; (3) Penyimpangan Kontrak; (4) Kolusi antara Pejabat Publik dan Rekanan; (5) Manipulasi dan tidak transparan; dan (6) Kelemahan Sumber daya Manusia.

Indikasi-indikasi kebocoran anggaran pemerintah akibat tindak pidana korupsi dan kolusi di PBJ dapat dilihat dari: (1) banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas, dan tidak efisien; (2) banyaknya alat yang dibeli tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; (3) PBJ tidak sungguh-sungguh dibutuhkan, karena di rencanakan bukan berdasarkan kebutuhan yang nyata (*real needs*); (4) Masa pakai barang/jasa lebih pendek yang hanya mencapai 30 hingga 40%; (5) Sejumlah per sen komisi (*fee*) yang harus disetor oleh kontraktor, panitia

pengadaan, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) kepada atasan dengan dalih untuk belanja organisasi; (6) perbedaan harga barang sejenis yang cukup menyolok antara satu instansi dengan instansi lain; dan (7) adanya beberapa faktur tagihan (*invoice*) yang berbeda untuk 1 (satu) jenis barang yang sama (Hehamahua, 2011; dalam Alfian, 2015).

F. *Probity Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa*

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (*realtime*) yang disebut *probity audit*. BPKP adalah lembaga yang ditugaskan melakukan pembinaan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diatur dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, melalui terlaksananya sistem pengendalian intern dalam proses pengadaan barang/jasa, *Probity Audit* diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-362 /K/D4/2012 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuan pedoman audit ini adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara nasional untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Probity diartikan sebagai integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*). Konsep *probity* tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel.. *Probity* audit utamanya dilakukan terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis (melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pelayanan dasar masyarakat, dan terkait dengan isu politis). Dalam pelaksanaannya, *probity* audit dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan barang/jasa atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa terjadi (*real time audit*) (BPKP, 2012).

Probity audit harus dilakukan sesuai dengan prinsip *probity* yang pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 yaitu:

1. Efisien dan efektif sehingga belanja pengadaan barang/jasa dapat memaksimalkan nilai uang (*best value for public money*).
2. Transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan bersaing.
3. Akuntabel yaitu seluruh proses pengadaan barang jasa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Dampak yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip-prinsip *probity* yaitu:

- a. Menghindari konflik dan permasalahan.

- b. Menghindari praktek korupsi.
- c. Meningkatkan integritas sektor publik melalui perubahan perilaku dan perubahan organisasi.
- d. Memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan kegiatan sektor publik telah dilakukan melalui proses yang berintegritas dan dapat dipercaya.
- e. Memberikan keyakinan secara objektif dan independen atas kejujuran (*probity*) proses pengadaan barang/jasa.
- f. Meminimalkan potensi adanya litigasi (permasalahan hukum).

Standar audit yang digunakan dalam melakukan *probity* audit atas pengadaan barang/jasa adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008) tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang meliputi: (a) Prinsip-Prinsip Dasar; (b) Standar Umum; (c) Standar Pelaksanaan; (d) Standar Pelaporan; (e) Standar Tindak Lanjut *Probity* auditor diberikan kewenangan untuk mengakses secara penuh seluruh catatan, personil (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Kontraktor dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa), mengamati pertemuan-pertemuan, melakukan kunjungan lapangan dan membuat copy (*photo copy*) dokumen relevan yang diperlukan. Pelaksanaan *probity* audit tidak memindahkan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari ULP/PA/KPA/PPK kepada *probity* auditor. Tanggung jawab

pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi auditan. Tanggung jawab auditor terbatas pada hasil audit, pendapat dan/atau saran yang diberikan kepada auditan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa (BPKP, 2012).

Jenis audit pengadaan barang/jasa pemerintah (APBJ) adalah audit dengan tujuan tertentu, (vide penjelasan Pasal 4 ayat 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Audit dengan tujuan tertentu ini merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan pendekatan *Probity*. *Probity audit* diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (*real time*) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.

Ruang lingkup *probity audit* adalah setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Institusi dan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam satu tahun anggaran atau lebih, antara lain: Satuan Kerja /SKPD, Kantor, Dinas, Unit Pelaksana Teknis Pusat/Daerah, BI/BHMN/BUMN/BUMD dan Badan Usaha Lainnya, termasuk pemanfaatan barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud dimulai dari perencanaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (BPKP, 2012).

Pelaksanaan *Probity* Audit atas Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1. Persiapan

Probity audit dilakukan secara *real time* selama proses pengadaan barang/jasa, sehingga memerlukan waktu dan biaya yang besar, oleh karena itu perlu dibuat suatu rencana probity audit (*Probity Audit Plan*).

2. Pelaksanaan dan Pelaporan

Langkah-langkah pelaksanaan probity audit dan pelaporan hasil audit mengacu pada “Pedoman *Probity* Audit Pengadaan Barang/Jasa” yang terdiri dari tahapan: Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Pascakualifikasi, Pemilihan Prakualifikasi, Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha, Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Perseorangan, Pelaksanaan Kontrak Konstruksi, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.

Audit pengadaan barang/jasa bertujuan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah dilakukan oleh pelaksana pengadaan berdasarkan kejujuran, integritas dan kebenaran untuk mentaati prinsip pengadaan sesuai ketentuan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel (BPKP,2012). Sasaran *probity* audit adalah:

1. Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan secara benar sesuai dengan kebutuhan yang benar, baik segi jumlah, kualitas, waktu dan nilai pengadaan yang menguntungkan negara.

2. Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah diikuti dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meyakinkan bahwa kuantitas, kualitas dan harga barang/jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta diserahterimakan tepat waktu.
4. Meyakinkan bahwa barang yang diperoleh telah ditempatkan di lokasi yang tepat, dipertanggungjawabkan dengan benar, dan dimanfaatkan sesuai tujuan penggunaannya.
5. Mencegah penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
6. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa guna penyempurnaan sistem tersebut.

G. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik

Akuntabilitas adalah proses penganggaran dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Indrianasari, 2017). Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Lily, 2015). Lebih lanjut, menurut Kumorotomo (2005) dalam Novitaningrum (2014) Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang

sesungguhnya. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka semakin tinggi kepercayaan *public-stakeholders* terhadap pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002; dalam Nurrezkiana dkk, 2017).

Menurut Mardiasmo (2009); dalam Lily (2015), akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertical (*Vertical Accountability*)

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Dapat berupa Pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja *financial* pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Lembaga Administrasi Negara (2007: 57) dalam Novitaningrum (2014) memberikan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan;
- b. Pertanggungjawaban kinerja;
- c. Intensitas penyimpangan;

d. Upaya tindak lanjut penyimpangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa yang mengacu pada *probity audit*, diartikan sebagai “*good process*” yaitu proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. *Probity audit* merupakan kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik (BPKP, 2012).

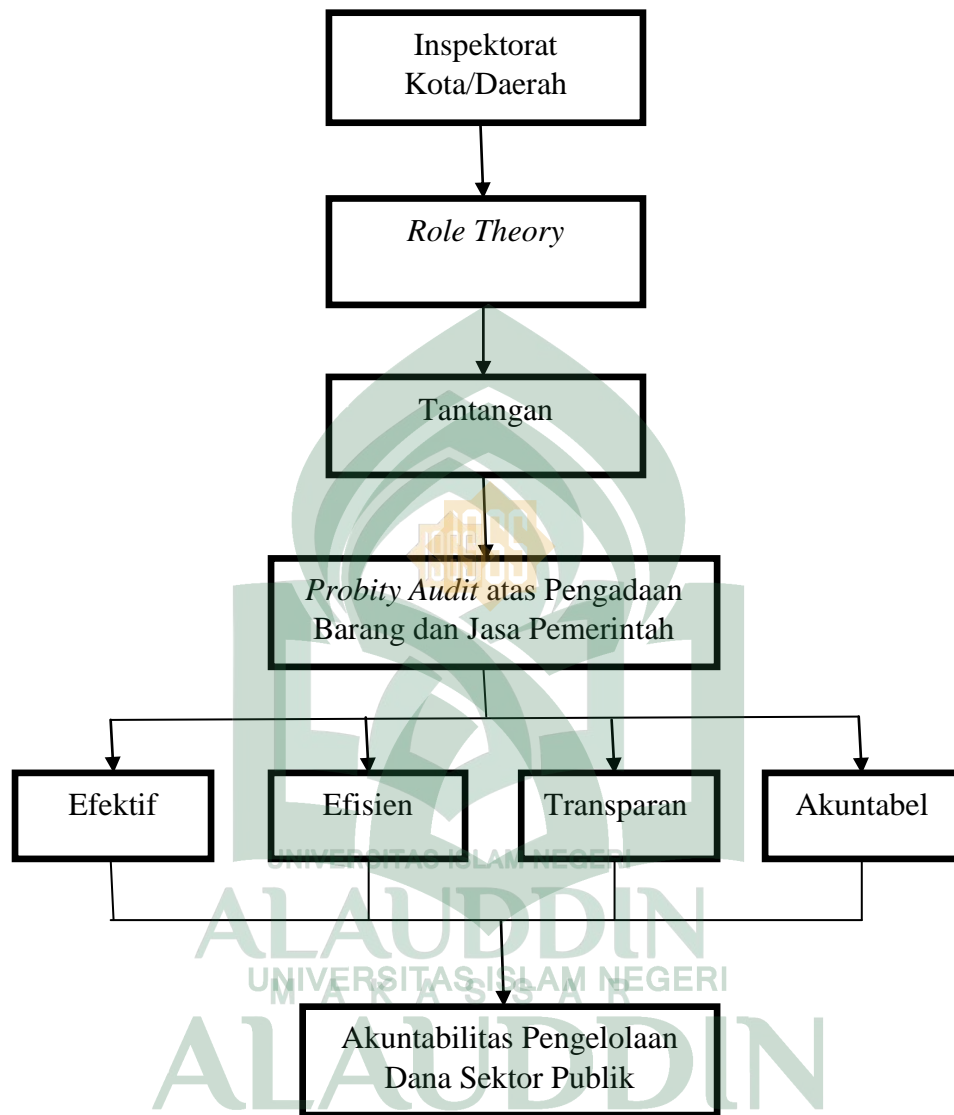
H. Rerangka Pikir

Sebagai salah satu kegiatan pelayanan publik, pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan aktivitas yang paling disorot, banyak pejabat pemerintah harus berhadapan hukum karena melakukan penyelewengan. Menyikapi hal ini berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, salah satunya yaitu adanya *Probity Audit* atas Pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya *Probity Audit*, diharapkan dapat untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan

perundangan berlaku, sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah dan demikian dapat meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Lebih lanjut, *Probit audit* dapat mendorong peran dan fungsi APIP dalam *Prevent*, *Deter* dan *Detect* sebagai *Early Warning System* atas proses pengadaan barang dan jasa; serta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (BPKP, 2012). Akan tetapi pendekatan *Probit audit*, belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh Instansi- instansi yang bertugas dalam hal pengawasan pemerintah daerah, berbagai hambatan dapat menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam menerapkan pendekatan audit tersebut. Secara sederhana rerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 2.1
Rerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data secara induktif, serta lebih menekankan pada makna. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus disini lebih sesuai karena teknik studi kasus memiliki fokus penelitian yang spesifik dan mendalam pada kasus sebagai objek yang diteliti. Penelitian kualitatif menurut Bogdan & Biklens dalam Rahmat (2009) adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Cakupan metode kualitatif yakni sebagai kumpulan data empiris, hasil wawancara, teks-teks hasil pengamatan, dan visual yang menggambarkan makna keseharian.

Penulis menggunakan penelitian Kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian, karena dengan penelitian Kualitatif penulis yakin mampu menangkap fenomena yang terjadi pada pemerintah kota/daerah, khususnya tantangan dalam pelaksanaan *Probity audit* atas Pengadaan barang dan jasa, yang dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Lokasi Penelitian yaitu pada Inspektorat Kota Makasaar, Jl. Teduh Bersinar No.6, Gunung Sari, Makassar,

Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu instansi yang melakukan *Probit Audit* atas pengadaan barang/jasa pemerintah.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui tentang tantangan dalam pelaksanaan *probit audit* atas pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat kota Makassar, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Alasan dari penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus disini karena teknik studi kasus memiliki fokus penelitian yang spesifik dan mendalam pada kasus sebagai objek yang diteliti. Hal ini dirasa tepat digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan *probit audit* apabila dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data Kualitatif adalah data yang berkaitan dengan non angka yang bersifat deskriptif, seperti struktur organisasi perusahaan dan gambaran umum instansi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan dengan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak Inspektorat Kota Makassar, yakni Auditor yang melakukan audit

atas Pengadaan Barang dan Jasa serta memiliki pemahaman mengenai *Probit Audit* pada Inspektorat Kota Makassar. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal-jurnal yang menjadi panduan dalam memahami data data penelitan dan dokumen- dokumen yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian yang diperoleh dari Inspektorat Kota Makassar.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Observasi yang dipilih oleh peneliti adalah observasi pasif atau *passive participation* dikarenakan peneliti hanya mengumpulkan data dengan mendatangi objek penelitian untuk mengadakan pengamatan tetapi tidak ikut terlibat langsung mengenai proses pelaksanaan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dipergunakan untuk

mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara mendalam ini diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan, yaitu Auditor yang melakukan audit atas Pengadaan Barang dan Jasa serta memiliki pemahaman mengenai *Probity Audit* pada Inspektorat Kota Makassar.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

4. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi merupakan teknik pencatatan dan pengumpulan data dari dokumen yang ada pada perusahaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian serta hal-hal yang berkaitan.

5. Internet *searching*

Penelitian ini menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dengan memilih beberapa orang informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek penelitian untuk tujuan tertentu. Informan yang dipilih dengan kriteria mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan *probity audit* atas Pengadaan barang dan jasa ,yang terdiri atas informan utama, yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, dan informan pendukung, yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Alat Perekam
2. Kamera
3. Alat tulis
4. Handphone

5. Daftar pertanyaan wawancara
6. Buku, jurnal, dan referensi lainnya

F. *Pengelolaan dan Analisis Data*

Proses pengelolaan dan analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sampai selesainya proses pengumpulan data tersebut. Adapun proses-proses tersebut dapat dijelaskan ke dalam beberapa tahap berikut:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting, kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan dari responden dengan melakukan *horizontalizing*, yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik, dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat tumpang tindih dihilangkan.
4. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.
5. Penyajian data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode interpretif, diawali dengan menjelaskan rumusan masalah dengan persepsi penulis sebagai pengantar untuk menyinggung persepsi informan mengenai pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang di peroleh yang berhubungan dengan rumusan masalah dijelaskan terlebih dahulu

kemudian menghubungkannya dengan teori untuk bisa menjawab rumusan masalah. Karena penelitian ini menggunakan metode interpretif maka penyajian hanya sebatas pemaparan antara data yang diperoleh dengan teori untuk menjawab permasalahan.

6. Penarikan kesimpulan. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

G. Pengujian Keabsahan Data

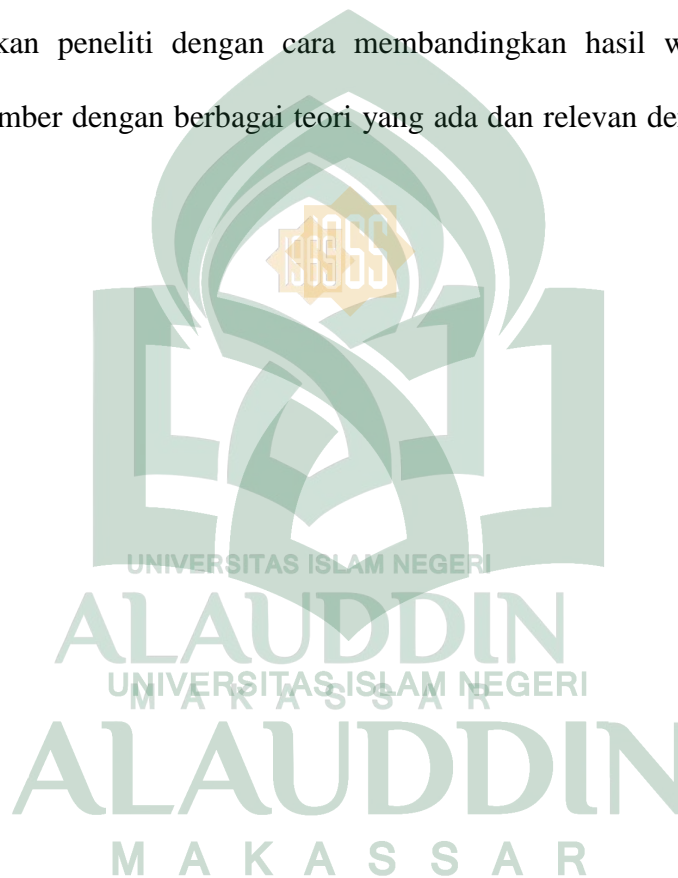
Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Salah satu cara yang paling penting dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, yang dapat berupa metode, teori ataupun sumber data. Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Meleong dalam Arifyanto dan Kurrohman, 2014).

Penelitian ini menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dengan informan, peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah,

catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

2. Triangulasi dengan teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Triangulasi dengan teori dilakukan peneliti dengan cara membandingkan hasil wawancara dari narasumber dengan berbagai teori yang ada dan relevan dengan penelitian ini.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Inspektorat Kota Makassar

Sesuai Peraturan Menteri dalam negeri No. 64 tahun 2007, Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Dalam rangka memenuhi target RPJMN, maka BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 di Inspektorat daerah Kota Makassar, melakukan Penilaian untuk Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3. Atas Penilaian ini Inspektorat Daerah Kota Makassar telah mencapai Kapabilitas APIP Level 3. Demikian pula dengan Maturitas SPIP, pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 di Inspektorat Daerah Kota Makassar, melalui *Reasessment* maka berdasarkan laporan nomor: LAP-804/PW21/3/2017 mendapatkan nilai “3, 226” atau “terdefinisi”.

Kantor Inspektorat Kota Makassar, adalah suatu badan instansi pemerintah yang berada di daerah Kota Makassar dan terletak di

Perumahan Griya Fajar Mas Jl. Teduh bersinar No. 7 Makassar. Inspektorat daerah Kota Makassar dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar No. 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Inspektorat daerah Kota Makassar adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada walikota dan secara teknis *administrative* mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Inspektorat Daerah Kota Makassar telah memperoleh Sertifikat ISO 9001: 2008 dan yang terbaru adalah 9001:2015 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan *United Registrar of System*.

2. Visi dan Misi

Visi inspektorat daerah Kota Makassar yaitu “*Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa Melalui Pengawasan yang Efektif dan Profesional*”. Untuk mewujudkan visi tersebut didukung dengan misi “*Terwujudnya Pengawasan Internal Pemerintah Kota Makassar yang Efektif*”.

3. Susunan Organisasi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Walikota Makassar dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Inspektorat menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Inspektur
2. Sekretaris terdiri atas :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi jabatan pada kantor Inspektorat Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, yaitu:

1. Inspektur

Tugas dan fungsi inspektur pada pasal 7 yaitu;

- a. Inspektur mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2) pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengawasan;
- 3) pengkoordinasian tindak lanjut pengawasan;
- 4) penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5) pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan;
- 6) pembinaan urusan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan administrasi umum dan urusan rumah tangga inspektorat;
- 7) pembinaan kelembagaan, jabatan fungsional auditor dan pengembangan sumber daya manusia.

2. Bagian Tata usaha

Tugas dan Fungsi bagian Tata Usaha pada Pasal 8 adalah:

- 1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua satuan organisasi dalam lingkup Inspektorat di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan;

- b. menghimpun, mengirim dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat fungsional pengawasan; menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- c. menyiapkan dan menginventarisir bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- e. melaksanakan administrasi jabatan fungsional.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua kelompok dengan tugas melaksanakan, memimpin, mengarahkan, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan audit/pemeriksaan serta melakukan pengkajian dan evaluasi hasil audit.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan daftar materi audit;
 - b. perumusan dan penyusunan program kerja audit;

- c. perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan audit;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Inspektur.

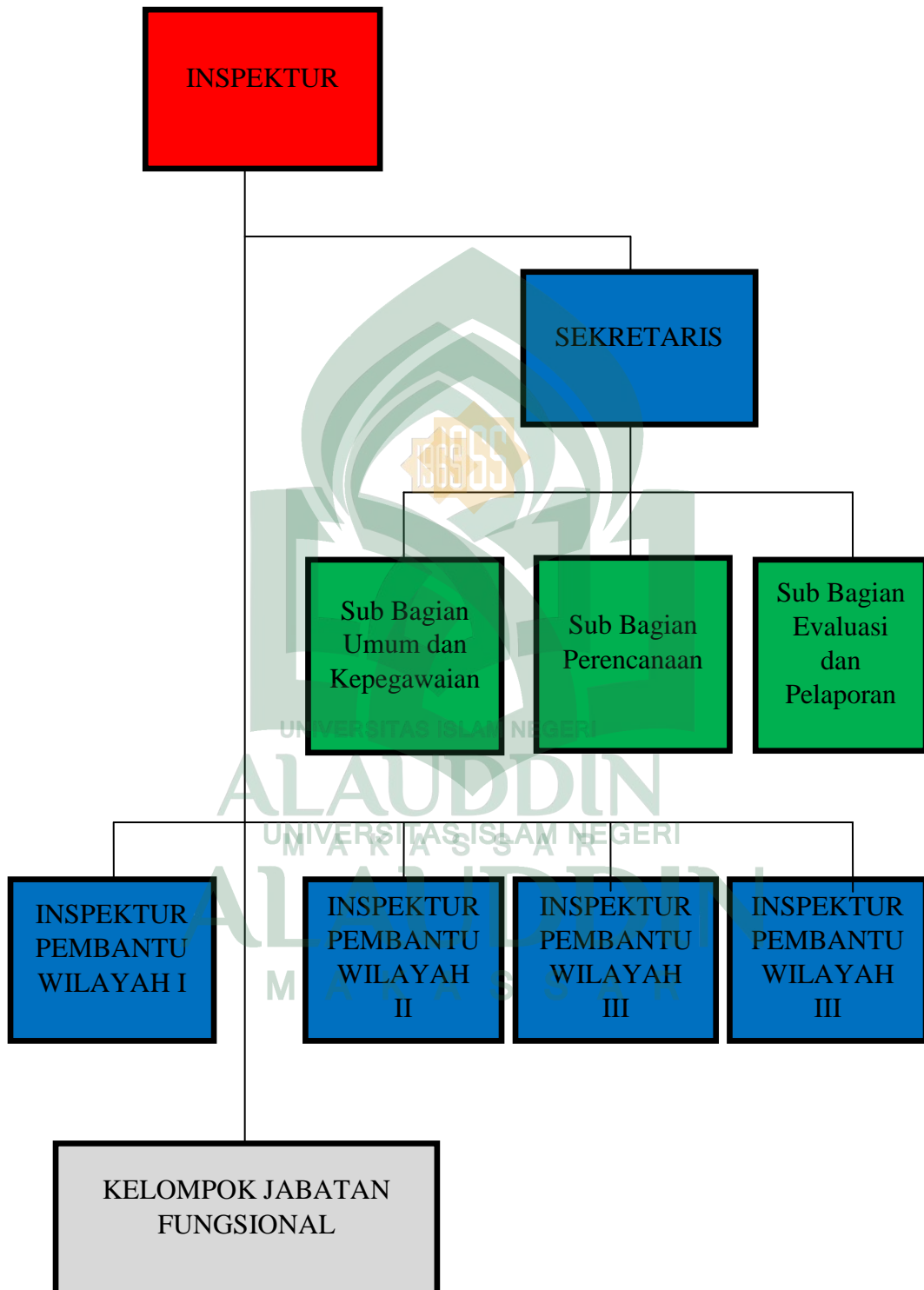
Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pejabat Fungsional Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pemeriksaan pada instansi pemerintah dan masyarakat umum.

Kemudian, pada Pasal 11 ayat (1) ditegaskan bahwa pengangkatan Pejabat Fungsional Auditor ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal (2) ditetapkan bahwa penempatan Pejabat Fungsional Auditor ke dalam kelompok Jabatan Fungsional Auditor ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Secara teknis, struktur organisasi inspektorat kota makassar digambarkan dalam struktur bagan sebagai berikut:

ALA UDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Makassar



Sumber: Profil Inspektorat Daerah Kota Makassar (2017)

4. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil Inspektorat Daerah Kota Makassar sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Bazetig
1.	Inspektur	1
2.	Sekretaris	1
3.	Inspektur Pembantu	4
4.	Kepala Sub Bagian	3
5.	Pejabat Fungsional Auditor	23
6.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)	3
7.	Pejabat Fungsional Umum	26
8.	Pegawai Kontrak	23
	Jumlah	84

Sumber: Profil Inspektorat Daerah Kota Makassar (2017)

5. Program Dan Kegiatan Tahun 2017

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara Komprehensif pada Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar
- 2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar
- 3) Pengelolaan Data Base Hasil Pengawasan
- 4) Inventarisasi Hasil Temuan Pemeriksaan
- 5) Pemutakhiran Data Temuan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar
- 6) Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan APIP

- 7) Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Hasil Temuan Aparat Pengawasan Internal
- 8) Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 9) Penilaian Kredit Jabatan Fungsional Auditor
- 10) Pemantauan dan Pemeriksaan Kegiatan Belanja Modal OPD Lingkup Kota Makassar
- 11) Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada OPD Kota Makassar
- 12) Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK
- 13) Pemeriksaan Dana BOS
- 14) Inventarisasi Wajib LP2P PNS
- 15) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi
- 16) Evaluasi LAKIP OPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar
- 17) Monitoring dan Evaluasi atas Pencatatan Aset Hasil Pengadaan Barang dan Jasa yang Bersumber dari Dana APBD dan non APBD
- 18) Monitoring atas Proses Tutup Kas Akhir Tahun OPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar
- 19) Pendampingan Pemeriksaan Eksternal
- 20) Monitoring atas Pencatatan Saldo Persediaan Akhir Tahun OPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar
- 21) Pemantauan Rencana Aksi Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- 22) Evaluasi Berkara Temuan Hasil Pengawasan
- 23) Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa
- 24) Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 25) Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
- 26) Penyelesaian Hasil Temuan Ombudsman RI
- 27) Monitoring Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN) Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan
- 2) *Audit Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO.

Tabel 4.3

Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Waktu Penelitian	Jabatan
1	Bakhrun Silipu, ST	24 Juli 2018	Auditor Muda
2	Andry, SE., M.Si., Ak., CA, AAP 'A'	31 Juli 2018	Auditor Muda

B. Audit Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Kota Makassar

Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (APBJ) adalah audit dengan tujuan tertentu, (Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara), yang merupakan audit atas sistem pengendalian intern pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 76 menyatakan bahwa Menteri/ Kepala

Lembaga/ Kepala Daerah wajib melakukan Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Aparat Pengawasan Internal pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah masing-masing, dengan melakukan kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/ atau penyelenggaraan *whistleblowing system* sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
2. Kepatuhan terhadap Peraturan;
3. Pencapaian TKDN;
4. Penggunaan Produk dalam Negeri;
5. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil;
6. Pengadaan Berkelanjutan.

Inspektorat Kota/ Daerah merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Ketika dikonfirmasi terkait audit pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar, Bakhrun Silipu selaku Auditor menyatakan bahwa:

“Yang selama ini kami lakukan adalah *Post Audit*, yaitu audit yang dilakukan setelah kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh SKPD. Kemudian kami juga mengadakan Konsultasi kepada SKPD, yang mana biasanya SKPD datang kepada kami ketika mau melakukan pengadaan dan ketika mereka kurang paham misalkan mengenai metode apa yang akan digunakan, mereka datang bertanya, kemudian kami memberikan arahan atau saran sesuai aturan yang berlaku.” (Wawancara Tanggal 24 Juli 2018)

Demikian juga pernyataan Andry, yang juga merupakan Auditor di Inspektorat Kota Makassar sebagai berikut:

“Dalam Audit Pengadaan barang dan jasa yang kami sebut *Post Audit* , kami melakukan yang namanya Pemeriksaan Belanja Modal, misal dalam pembangunan gedung, prosesnya biasanya Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK bersurat kepada kami, bahwa pekerjaannya sudah selesai, dan meminta kami untuk mengaudit. Kemudian pihak Inspektorat mengeluarkan surat tugas kepada para auditor untuk melakukan pengauditan terhadap penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Setelah dilakukannya pemeriksaan atau audit, ketika ditemukan misal adanya kekurangan volume biasanya dalam hal fisik, kami merekomendasikan kekurangan tersebut untuk disetorkan ke kas daerah atau ditindaklanjuti dengan penambahan volume. Selain permintaan langsung dari PPK, biasanya kami sendiri yang berinisiatif sendiri untuk menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan ketika hasil monitoring kami menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa tersebut beresiko tinggi. Kemudian, ketika ada pengaduan dari masyarakat bahwasanya pada pengadaan barang/ jasa tersebut terindikasi adanya *fraud*, kami tindaklanjuti dengan menerbitkan surat tugas pemeriksaan.” (Wawancara 31 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kota Makassar selaku auditor internal pemerintah telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam hal Pengawasan, Pemeriksaan, serta Pembinaan terhadap lingkungan pemerintah daerah khususnya mengenai Pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini tampak pada pernyataan auditor inspektorat yang mengungkapkan bahwanya mereka telah melakukan audit setelah kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan (*Post Audit*), serta memberikan jasa konsultansi kepada SKPD. Namun, dalam kutipan wawancara mengenai audit pangadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, informan menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ketika ditemukan kekurangan volume, auditor merekomendasikan kekurangan

tersebut untuk disetorkan ke kas daerah atau ditindaklanjuti dengan penambahan volume. Kekurangan volume atas pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bentuk penyimpangan, dan dari bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat, penyimpangan tersebut di terdeteksi dan ditangani setelah pengadaan barang dan jasa dilakukan . Hal ini menandakan bahwasanya proses pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar masih cenderung bersifat reaktif, dan belum bersifat proaktif, dikarenakan penyimpangan atas pengadaan barang dan jasa baru diketahui setelah terjadi.

Lebih lanjut, Audit pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa pasal 76, yang menyatakan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang rentang dijadikan media untuk melakukan berbagai kecurangan haruslah mendapat perhatian khusus. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah harus terus berupaya berperan secara nyata dan efektif dalam mengawal jalannya proses pengadaan barang dan jasa, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa dapat dicegah dan diminimalisir. Perihal keefektifan *Post Audit* yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat kota Makassar, Andry selaku auditor mengungkapkan:

“ Dari sisi keefektifan bisa saja dikatakan efektif, namun daya jangkau kami dalam melakukan audit setelah pelaksanaan kegiatan bisa dikatakan kurang, dibanding audit dilakukan ketika masih dalam perencanaan. Contoh dalam pembangunan gedung baru, bisa saja rencana pengadaan sudah diarahkan, karena kan niat untuk melakukan *fraud* sudah ada dari awal. Ataukah misalkan pengadaan ATK, ATK sudah ada barangnya paling kita hanya bisa memeriksa ketika adanya ketidaksesuaian dengan kontrak atau surat pesanan. tapi jika diawal, contoh barangnya di pesan 100 rim kertas, kalau kita dari perencanaan, betulkah ini harus dipesan 100 rim? Bisa saja cuma 50 gitu loh, jadi itukan lebih efektif dan efisien. Dibanding dia sudah terlaksana, dia sudah pesan 100, ujung-ujungnya yang digunakan cuma sekitar 80, 20 nya kan tidak efisien, tapi tetap kita harus memeriksa yang dipesan 100 dan barangnya juga harus 100” (Wawancara 31 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Audit Pengadaan Barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar belum sepenuhnya efektif dalam mencegah adanya penyimpangan yang terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa, serta tidak menjamin keefisienan Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini dikarenakan Inspektorat hanya melakukan pemeriksaan dan pengawasan setelah kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan. Seperti yang telah di bahas sebelumnya, pengadaan barang dan jasa yang rentan akan terjadinya penyimpangan selama proses pengadaan barang dan jasa, tidak terkecuali pada tahap perencanaan, oleh karena itu perlu dilakukan prosedur audit mulai pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan RKA untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Lebih lanjut, sebagai *quality assurance* Inspektorat Kota Makassar sebagai auditor internal pemerintah seharusnya mengawal proses pengadaan

sejak perencanaan sampai dengan serah terima hasil pengadaan, dan memberikan rekomendasi peringatan dini seandainya diketahui ada gejala penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penyimpangan-penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sering terjadi ialah penggelembungan/*mark-up* anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan, penentuan jadwal waktu yang tidak realistis, pemaketan pekerjaan yang direkayasa, panitia tidak memiliki integritas, memihak dan tidak transparan, dokumen administrasi tidak memenuhi syarat, evaluasi tidak sesuai kriteria/kriteria cacat, pekerjaan fiktif, serta hasil pekerjaan tidak tepat jumlah, mutu dan waktu. Dari beberapa penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi tersebut, menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi pada Pengadaan barang dan jasa bisa saja terjadi dan terindikasi adanya kecurangan dari awal perencanaan pengadaan hingga pada tahap hasil pekerjaan. Oleh karena itu, Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah haruslah melakukan pemeriksaan dan pengawalan dari awal perencanaan hingga tahap pengadaan selesai demi meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan terjadi selama proses Pengadaan serta keefisienan barang dan jasa yang dihasilkan.

Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa harus terencana secara matang dan rinci karena dalam kegiatan tersebut banyak sekali celah terjadinya penyimpangan, baik penyimpangan prosedural, teknis, maupun non teknis, yang dapat memperkaya pelaku. Berdasarkan teori peran (*Role Theory*), yang menyatakan bahwa peran sebagai suatu kompleks pengharapan

manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya, Inspektorat Kota Makassar yang dibentuk sebagai Aparat Intern Pengawasan Pemerintah diharapkan mampu berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengawasan pemerintah daerah. Apabila peran pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat berjalan seperti yang diharapkan, maka kolusi, korupsi dan nepotisme pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah akan bisa di tekan, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam Al-Qur'an Surah Az-Zumar ayat 39, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya: “Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui”. (Q.S Az-Zumar ayat 39)

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada umat islam agar melakukan pekerjaan sesuai dengan keadaannya, dan kelak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Inspektorat Kota Makassar yang dibentuk sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah haruslah bekerja sesuai dengan tugas yang di amanahkan kepadanya, dan mampu menjalankan tugas tersebut dengan sebaik mungkin, khususnya dalam hal pengawasan kepada pemerintah kota Makassar agar kelak mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT .

C. Probity Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan adalah melaksanakan audit selama proses pengadaan barang/jasa berlangsung (*realtime*) yang disebut *probity audit*. BPKP adalah lembaga yang ditugaskan melakukan pembinaan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana diatur dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, melalui terlaksananya sistem pengendalian intern dalam proses pengadaan barang/jasa, *Probity Audit* diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-362 /K/D4/2012 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuan pedoman audit ini adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektifitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara nasional untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa. *Probity Audit* dilakukan pada setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari:

1. Perencanaan Pengadaan barang dan jasa, yaitu audit mulai dilaksanakan pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan RUP yang merupakan bagian dari penyusunan RKA-KL/SKPD. Pelaksanaan prosedur audit dapat dilakukan pada saat proses sedang berlangsung (Audit atas Proses/AP) dan/ atau segera setelah proses selesai (Audit atas Output/AO).

Khusus untuk kegiatan pembahasan anggaran di TIM Anggaran Eksekutif dan Pembahasan Anggaran di DPR/D, audit dilakukan pada saat proses pembahasan anggaran berlangsung melalui observasi.

2. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan jasa, yaitu audit dilakukan dengan melihat dokumen *output* setiap tahapan pengadaan barang/jasa segera setelah tahapan persiapan pemilihan barang/jas selesai dilaksanakan oleh personil pengadaan.
3. Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dengan Pascakualifikasi, yaitu audit mulai dilaksanakan pada saat pengumuman pengadaan hingga penunjukan penyedia barang/jasa. Pelaksanaan prosedur audit dapat dilakukan pada saat proses sedang berlangsung (Audit atas Proses/AP) dan/atau segera setelah proses selesai (Audit atas Output/ AO).
4. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Prakualifikasi, yaitu audit dilaksanakan pada saat pengumuman prakualifikasi hingga penunjukan penyedia barang/ jasa. Pelaksanaan prosedur audit dapat dilakukan pada saat proses sedang berlangsung (Audit atas Proses/ AP) dan/ atau segera setelah proses selesai (Audit atas Output/ AO)
5. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultasi Badan usaha serta Pemanfaatannya, yaitu audit dilaksanakan atas tahapan penandatanganan kontrak setelah ditetapkannya pemenang lelang (Audit atas Output/ AO) namun sebelum ditandatangani kontrak pengadaan jasa. Kemudian pada pelaksanaan kontrak, audit dilaksanakan pada setiap tahapan proses pelaksanaan kontrak jasa konsultasi (Prosedur audit

dilaksanakan pada saat proses sedang berlangsung dan/ atau segera setelah proses selesai). Pada pemanfaatan hasil jasa konsultasi, audit dilaksanakan setelah adanya serah terima jasa dari penyedia kepada PPK sampai dengan jasa dimanfaatkan oleh pengguna jasa.

6. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultasi Perorangan serta Pemanfaatannya, yaitu audit dilaksanakan atas tahapan penandatanganan kontrak setelah ditetapkannya pemenang lelang namun sebelum ditandatanganinya kontrak pengadaan jasa, pada setiap tahapan proses pelaksanaan kontrak jasa konsultasi perorangan, dan setelah adanya serah terima dari penyedia kepada PPK sampai dengan jasa dimanfaatkan oleh pengguna jasa (Pelaksanaan prosedur audit dapat dilakukan pada saat proses sedang berlangsung dan/ atau segera setelah proses selesai).
7. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Kontruksi serta Pemanfaatannya, yaitu audit dilaksanakan atas tahapan penandatanganan kontrak setelah ditetapkannya pemenang lelang namun sebelum ditandatanganinya kontrak pengadaan jasa, pada saat PPK menyerahkan lokasi pekerjaan kepada penyedia barang/ jasa, dan penyerahan hasil pekerjaan kontruksi kepada PA/KPA (Pelaksanaan prosedur audit dapat dilakukan pada saat proses sedang berlangsung dan/ atau segera setelah proses selesai).
8. Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa lainnya serta Pemanfaatannya, yaitu audit dimulai setelah

pengumuman penetapan pemenang lelang namun sebelum ditandatanganinya kontrak, pada setiap tahapan proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang/ jasa lainnya, dan pada setiap proses pemanfaatan pengadaan barang/ jasa lainnya (Pelaksanaan prosedur audit dapat dilakukan pada saat proses sedang berlangsung dan/ atau segera setelah proses selesai).

Probity diartikan sebagai integritas (*integrity*), kebenaran (*uprightness*), dan kejujuran (*honesty*). Konsep *probity* tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau ketidakjujuran tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel. *Probity* audit utamanya dilakukan terhadap paket pekerjaan yang bersifat strategis (melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pelayanan dasar masyarakat, dan terkait dengan isu politis). Dalam pelaksanaannya, *probity* audit dilakukan bersamaan dengan proses pengadaan barang/jasa atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa terjadi (*real time audit*) (BPKP, 2012). Ditanya mengenai pemahamannya terkait *Probity Audit*, Auditor Inspektorat Kota Makassar, Bakhrun Silipu memaparkan:

“*Probity Audit* itu mengikuti jalannya Pengadaan Barang dan Jasa, dari perencanaan, tahap persiapan, pemilihan penyedia, tahap kontrak, terus pelaksanaan pengadaan itu sendiri, sampai ke tahap penyerahan.” (Wawancara, 24 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa informan telah memiliki pengetahuan mengenai Pelaksanaan *Probity Audit*

atas Pengadaan barang dan jasa. Adanya pendekatan *Probit Audit* ini, merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang selama ini dianggap sebagai penyumbang terbesar tindak pidana korupsi dalam sektor publik. Terkait dengan hal tersebut, Andry yang juga sebagai Auditor Inspektorat Kota Makassar menyatakan sebagai berikut:

“Memang salah satu poin krusial dalam pengelolaan dana sektor publik itu yaitu diproses pengadaan barang dan jasa. Biasanya Fraud di pengadaan barang dan jasa itu kan terjadi mulai dari awal tahap perencanaan, karena memang niat pastinya sudah direncanakan dari awal. Salah satu fungsi dari *Probit Audit* itu, yah bisa meminimalisir *fraud* ketika kita mulai mendampingi dari tahap perencanaan, sampai implementasi atau sampai dengan penyelesaian pengadaan”. (Wawancara 31 Juli 2018)

Lebih lanjut, beliau memaparkan:

“Keunggulan dari *Probit Audit* yaitu bisa berfungsi sebagai *Early Warning System* atau deteksi dini, karena disini kita mendampingi proses pengadaan pertahapan, dari tahap awal sampai tahap akhir. Ketika kita sudah mulai mengidentifikasi adanya indikasi-indikasi *fraud* di setiap tahapan-tahapan tersebut, kita bisa langsung menindaklanjuti, di banding dengan sudah direncanakan sudah dilaksanakan sudah selesai proses pengadaan baru kita turun ke lapangan, tentukan istilahnya ini Nasi sudah jadi bubur, itulah yang membedakan antara *Post Audit* dengan *Probit Audit*.” (Wawancara, 31 Juli 2018)

Hal tersebut senada dengan pernyataan Bakhrun Silipu, yang juga

Auditor Inspektorat Kota Makassar sebagai berikut:

“Seharusnya iya, karena resiko-resiko pengadaan sebelum pengadaan itu dilaksanakan sudah bisa di minimalisir dari tahap awal perencanaan. Harusnya Penyimpangan-penyimpangan yang biasanya terjadi selama proses pengadaan bisa di minimalisir”. (Wawancara, 24 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ditambah dengan beberapa penjelasan sebelumnya mengenai *Probit Audit* atas pengadaan barang dan jasa, maka dapat di simpulkan bahwa dengan dilaksanakannya Pendekatan *Probit Audit*, penyimpangan- penyimpangan yang mungkin terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa dapat dicegah atau di minimalisir karena dilakukannya pengawasan sejak dari tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga tahap pemanfaatan barang dan jasa tersebut, sehingga indikasi-indikasi adanya penyimpangan bisa di deteksi sejak dini dan langsung di tindaklanjuti. Dalam *Probit Audit*, auditor diberikan kewenangan untuk mengakses secara penuh seluruh catatan, personil (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pmbuat Komitmen, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Kontraktor dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan dan jasa), mengamati pertemuan-pertemuan, melakukan kunjungan lapangan dan membuat copy (*photo copy*) dokumen relevan yang diperlukan, sehingga audit pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dapat memberikan keyakinan bahwa pelaksana pengadaan barang dan jasa telah mentaati prinsip pengadaan sesuai ketentuan, yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel.

Probit Audit merupakan kegiatan penilaian (*independen*) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, kejujuran, dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Probit audit* harus dilakukan sesuai dengan prinsip *probit* yang pada

dasarnya merupakan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 yaitu:

1. Efisien dan efektif sehingga belanja pengadaan barang/jasa dapat memaksimalkan nilai uang (*best value for public money*).
2. Transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, dan bersaing.
3. Akuntabel yaitu seluruh proses pengadaan barang jasa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Dampak yang di hasilkan dari proses pengadaan barang dan jasa yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut, yaitu menghindari konflik dan permasalahan, menghindari praktik korupsi, meningkatkan integritas sektor publik, memberikan keyakinan secara objektif dan independen atas kejujuran (*Probity*) proses pengadaan barang dan jasa, serta meminimalkan potensi adanya litigasi (permasalah hukum). Dengan demikian, *Probity Audit* yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Terkait dengan peningkatan akuntabilitas Pengelolaan dana sektor publik, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Auditor Inspektorat Kota Makassar, Andry yang mengungkapkan:

“Secara khusus di pengadaan barang dan jasa, mungkin bisa lebih akuntabel, dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik khususnya dana-dana atas pengadaan barang dan jasa karena setiap tahapan audit yang dilakukan juga dapat memberikan jaminan dan keyakinan kita terhadap akuntabilitas per tahapan pengadaan barang dan jasa. Pada intinya bisa”. (Wawancara, 31 Juli 2018).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Probity Audit* atas Pengadaan Barang

dan jasa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, karena dalam pelaksanaan *Probit Audit*, dilakukan pengawasan dari tahap awal hingga tahap akhir pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat memberikan jaminan dan keyakinan mengenai pengadaan barang dan jasa yang lakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak memungkinkan adanya penyimpangan yang terjadi.

D. Tantangan dalam Pelaksanakan *Probit Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Keberhasilan dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pelaksanaan *Probit Audit* tidak akan terlaksana dengan sendirinya, tanpa upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Adanya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-326/K/D4/2012 tentang Pedoman *Probit Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak semata-mata mudah untuk di laksanakan, salah satunya Inspektorat Kota Makassar yang sampai saat ini belum melaksanakan *Probit Audit*. Hal ini berdasarkan konfirmasi dari Auditor Inspektorat Kota Makassar, Bakhrun Silipu yang menyatakan bahwa :

“*Probit Audit* atas Pengadaan barang dan jasa di Inspektorat belum pernah dilakukan memang, kami cuma mendapat bimbingannya itu atau diklatnya baru 2 orang auditor”.(Wawancara 24 Juli 2018).

Ketika di konfirmasi lagi terkait wajib atau tidaknya *Probit Audit* dilaksanakan, Auditor Inspektorat Kota Makassar Bakhrun Silipu menyatakan sebagai berikut:

“Menegenai Pelaksanaan *Probity Audit*, saya tidak mengatakan wajib, tapi memang seharusnya dilakukan”. (Wawancara 24 Juli 2018).

Menanggapi pernyataan tersebut, peneliti kemudian mempertanyakan hal tersebut, jika memang seharusnya dilakukan mengapa sampai saat ini inspektorat belum melaksanakan *Probity Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa?.

Dengan tegas, namun tetap dengan nada yang lembut Beliau memaparkan:

“Belum dilakukan, karena Sumber Daya Manusia kami terbatas Cuma sekitar 20an auditor, dan waktu kami itu habis untuk melakukan *Post Audit*. Dan juga kendalanya itu waktu, karena untuk melakukan *Probity Audit* mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyerahan itu kan lama, *Post Audit* hanya memerlukan waktu sekitar 15 hari, kalau *Probity Audit* kan lama misalkan perencanaan untuk tahun ini, pekerjaannya akan dilaksanakan untuk tahun depannya, itu harus diikuti terus. Tahap penyedia saja mungkin memerlukan waktu 2 minggu, kemudian tahap pelaksanaan mungkin saja berbulan-bulan jadi prosesnya lama”. (Wawancara 24 Juli 2018)

Hal ini juga sejalan dengan yang di ungkapkan oleh Andry, yang menyatakan bahwa:

“ Kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan *probity audit* itu, yang pertama keterbatasan sumber daya manusia kami, jumlah auditor kami di Inspektorat masih minim cuma sekitar 20an. Nah terus kami kan sudah punya program yang namanya program kerja pengawasan tahunan, yang dimana itu sudah menggunakan sumber daya yang tersedia, pada saat kita mau melaksanakan *probity audit*, tentu kita merencanakannya terlebih dahulu pada program kerja pengawasan tahunan kami, nah itu belum direncanakan sampai tahun ini”. (Wawancara, 31 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia dan waktu, serta belum direncanakannya dalam program kerja pengawasan menjadi salah satu alasan belum

dilaksanakannya *Probit Audit* atas Pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Kota Makassar. Pada dasarnya proses *probit audit* merupakan kegiatan yang berkesinambungan, tidak seperti audit pada umumnya, sehingga jangka waktu pelaksanaannya sangat panjang, bahkan dapat berbulan-bulan, tergantung dari jadwal proses pengadaan barang dan jasa, karena tujuannya adalah untuk mengawal proses pengadaan dari mulai proses perencanaan sampai dengan pemanfaatannya. Dengan waktu yang lama tersebut, pelaksanaan *probit audit* atas pengadaan barang dan jasa akan lebih banyak membutuhkan SDM, dibanding dengan audit yang biasa dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar.

Terkait belum pernahnya di laksanakan *Probit Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa oleh Inspektorat Kota Makassar, setelah peneliti selesai mengajukan beberapa pertanyaan yang tertera di transkrip, peneliti berinisiatif berbincang-bincang lagi dengan Bapak Bakhrun Silipu, mengenai Instansi-Instansi yang telah melakukan *Probit Audit*. Dari perbincangan tersebut, beliau kembali menyatakan sebagai berikut:

“Belum pernah dilakukan, karena memang belum ada penugasannya”. (Wawancara 24 Juli 2018)

Lebih lanjut, beliau memaparkan:

“Sebenarnya dulu ada pekerjaan yang mau sekali saya lakukan *Probit Audit*, ada bangunan yang di sebelah kantor di bangun dan dari awal kami ikuti tapi kami hanya mendampingi saja bukan penugasan *Probit Audit*, karena setiap tahapannya kami tidak ikuti.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat kota/daerah

seharusnya melakukan pelaksanaan *Probit Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa. Melalui *Probit Audit* atas Pengadaan barang dan jasa ini, dapat mendorong peran dan fungsi APIP dalam *Prevent*, *Deter*, dan *Detect* sebagai *Early Warning Sistem* atas pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Akan tetapi, dalam melaksanakan *Probit Audit* atas Pengadaan barang dan jasa yang merupakan termasuk jenis Audit tujuan khusus, tidak semerta-merta dengan mudah begitu saja dilakukan seperti jenis audit lainnya. Dalam melakukan *Probit Audit* atas Pengadaan Barang dan Jasa di butuhkan kesiapan khusus oleh Inspektorat Kota Makassar, agar audit dapat terlaksana dengan baik.

Berikut beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan *Probit Audit* atas Pengadaan Barang dan jasa pemerintah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Probit Audit atas pengadaan barang dan jasa, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (independen), yang disebut *Probit auditor*. Dalam auditnya, *probit auditor* melakukan peninjauan fisik, observasi, diskusi/wawancara untuk memberikan keyakinan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip *probit*. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:PER-362/ K/ D4/ 2012

tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang/ jasa, *Probity* auditor setidaknya memenuhi kriteria ideal sebagai berikut:

a. Syarat Personal

- 1) Memiliki pengetahuan dan kemampuan (*knowledge and skills*) yang berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa.
- 2) Independen dan objektif yaitu tidak memihak, bebas dari bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak Memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (*professional competence and due care*) dalam melaksanakan penugasan ketiga/kontraktor.
- 3) Memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 4) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak yang diaudit
- 5) Memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat di pertanggungjawabkan.
- 6) Memiliki pengetahuan tentang isu-isu *probity* dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah
- 7) Memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan

- 8) Mampu menyimpan rahasia atau informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit
- 9) Memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan
- 10) Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN
- 11) Bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum penugasan

b. Syarat Formal

- 1) Berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1)
- 2) Memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan Barang/Jasa
- 3) Memiliki Sertifikat Jabatan Auditor

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten merupakan faktor penting bagi keberhasilan di laksanakannya *Probity Audit* atas pengadaan barang dan jasa, sebab SDM lah yang bekerja dan turun langsung melaksanakannya. Untuk melaksanakan *Probity Audit*, di butuhkan pemahaman khusus mengingat *probity audit* tergolong baru di pemerintahan dan juga memerlukan waktu yang cukup lama karena banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan pengawasan. Oleh karena itu, Pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dalam meningkatkan kualitas SDM, yang dalam hal ini adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pemahaman Auditor mengenai *Probity Audit* di Inspektorat Kota Makassar belum begitu menyeluruh. Bukan hanya dari kualitas SDM,

melainkan dari jumlah SDM di Inspektorat kota Makassar pun masih terbilang kurang. Hal ini menjadi salah satu kendala belum dilaksanakannya *probity audit* di Inspektorat Kota Makassar, seperti yang dikemukakan pada hasil wawancara sebelumnya. Diperlukan peningkatan kuantitas SDM, serta pelatihan secara berkala bagi para SDM untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya dalam hal pelaksanaan *probity audit*. Pelatihan terkait *Probity Audit* tersebut telah di ikuti oleh auditor Inspektorat Kota Makassar. Hal tersebut dipaparkan oleh Bakhrun Silipu, selaku auditor Inspektorat Kota Makassar, sebagai berikut:

“Kami Cuma mendapatkan bimbingan atau diklatnya itu baru 2 orang auditor disini” (Wawancara, 24 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para Auditor Inspektorat Kota Makassar belum seluruhnya memahami dan memiliki kompeten dalam hal pelaksanaan *probity audit* atas pengadaan barang/jasa, serta terbatasnya jumlah auditor pada Inspektorat Kota Makassar yang hanya berjumlah 23 orang. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang di miliki oleh Inspektorat Kota Makassar agar dapat melaksanakan *Probity Audit* atas pengadaan barang dan jasa. Hal serupa di harapkan oleh Bapak Andry, yang mengungkapkan sebagai berikut:

”Harapan saya sebelum mempersiapkan melaksanakan probity audit ini, kita perlu meningkatkan kualitas dari para auditor yang akan melaksanakan probity audit, jadi itu menjadi poin penting peningkatan kualitas SDM. Auditor wajib di ikutkan diklat maupun bimtek-bimtek terkait dengan *probity audit*”. (Wawancara, 31 Juli 2018).

Dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, dibutuhkan penambahan aparatur Inspektorat Kota Makassar, yang dapat dilakukan dengan cara memutusi Aparat -aparatur pemerintah yang tidak memiliki peran aktif atau tugas yang penting dalam suatu SKPD, untuk ditugaskan ke Inspektorat Kota Makassar, kemudian dilakukan Pelatihan maupun diklat secara berkala agar dapat memberikan efek baik dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai auditor. Dengan mengikuti pelatihan terkait *probit audit*, para Auditor dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki, dan mampu memahami seluk-beluk mengenai pelaksanaan *probit audit* atas pengadaan barang dan jasa.

Faktor Sumber Daya Manusia menjadi kunci keberhasilan, mengingat pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh profesionalisme, kompetensi dan moral aparatur pengawasan/auditor. Dalam batas-batas tertentu, sistem pengawasan masih bisa berjalan meskipun dengan dana, sarana serta aksesibilitas wilayah rendah, asal ditunjang oleh faktor SDM yang baik. Sebanyak berapa pun biaya, selengkap apapun sarana dan prasarana, semudah apapun akses wilayah kalau tidak didukung oleh SDM yang memadai dan kompeten, maka pelaksanaan tugas pokok tersebut akan tersendat dan tidak akan berjalan efektif.

2. Komitmen Pimpinan

Seorang pemimpin yang mempunyai komitmen dan keyakinan kuat terhadap suatu perubahan yang akan membawa organisasinya kearah yang lebih baik, secara otomatis individu berada didalam organisasi

tersebut akan merasa optimal dan yakin dengan apa mereka kerjakan. Apalagi perubahan itu dipercaya dapat menunjang kinerja dan kemajuan organisasi dimana mereka bekerja, maka telah sepatutnya komitmen kuat dan rasa optimis dimiliki oleh setiap pemimpin. Ditambah lagi, ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 75, yang mewajibkan Aparat Pengawasan Internal pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah masing-masing, melakukan kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system* sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Suatu perencanaan dan penganggaran yang telah disusun demi memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya ini memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan agar apa yang ada dalam perencanaan dan penganggaran dapat berjalan. Mekanisme pengelolaan yang dimaksud adalah perangkat aturan yang menjadi pedoman dalam mengarahkan pengelolaan sumber daya pada tujuan serta sasarannya. Perangkat aturan atau dasar hukum ini ditetapkan dalam rangka mengukur kebutuhan publik dan alokasi sumber daya ini akan berjalan dengan lancar dan efektif jika didukung oleh peraturan yang memadai sehingga mendorong berlakunya praktek yang baik, tertib, dan akuntabilitas.

Dalam Pelaksanaan *Probity Audit*, perlu dukungan dari Pemerintah, dalam hal ini Walikota Makassar dan Kepala Inspektorat Kota Makassar. Adanya regulasi yang jelas baik sistem, prosedur maupun kebijakan pengawasan, serta anggaran yang memadai, dapat menambah keyakinan dan komitmen para Auditor selaku pelaksana untuk dapat melaksanakan *probity audit* atas pengadaan barang dan jasa tersebut. Berikut pemaparan dari Andry selaku auditor, mengenai komitmen dari Pimpinan Inspektorat Kota Makassar :

“Pada dasarnya sebuah pemerintahan yang baik pasti akan berkomitmen mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, tapi yah khusus di Inspektorat kota Makassar Pimpinan kami dalam hal ini kepala Inspektorat itu mempunyai komitmen untuk bisa melaksanakan *Probity Audit* ini, cuma dengan adanya kendala-kendala yang seperti sudah saya kemukakan tadi, seperti SDM dan belum direncanakannya di program kerja pengawasan tahunan kami, maka tahun ini kami belum bisa melakukan tapi mungkin tahun depan kami sudah mulai merencanakan”.(Wawancara 31 Juli 2018)

Lebih lanjut, informan menyampaikan harapannya terkait pelaksanaan *Probity Audit* sebagai berikut:

“Yah harapan saya, kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan *probity audit* ini bisa dituangkan dan direncanakan dalam program kerja pengawasan tahunan, dan disertai dengan anggaran yang memadai terkait dengan pelaksanaan *probity audit* ini”. (Wawancara 31 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen dalam melaksanakan *Probity Audit* atas pengadaan barang dan jasa pada Inspektorat Kota Makassar itu ada, namun dengan adanya keterbatasan-keterbatasan yang di miliki, maka sampai saat ini Inspektorat Kota Makassar belum melakukannya. *Probity Audit* secara

real time selama proses pengadaan barang dan jasa, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan waktu dan biaya yang besar dan membutuhkan perencanaan khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari para pimpinan untuk mendukung pelaksanaan *probity audit* atas pengadaan barang dan jasa tersebut, baik dalam peraturan dan kebijakan khusus, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, serta anggaran yang memadai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit Pengadaan Barang dan jasa yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar belum sepenuhnya efektif dalam mencegah adanya penyimpangan yang terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa, serta tidak menjamin keefisienan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan.
2. Pelaksanaan *Probity Audit* atas pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, dimana dalam pelaksanaan *Probity Audit*, dilakukan pengawasan dari tahap awal hingga tahap akhir pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat memberikan jaminan dan keyakinan mengenai pengadaan barang dan jasa yang lakukan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak memungkinkan adanya penyimpangan yang terjadi.
3. Tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Makassar Pelaksanaan *Probity Audit* atas pengadaan barang dan jasa ialah ditinjau dari dari Sumber Daya Manusia, Auditor Inspektorat Kota Makassar belum sepenuhnya memiliki kapasitas dalam pelaksanaan *Probity Audit*, hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah auditor dan tidak seluruhnya memiliki

pemahaman mengenai *probity*. Ditinjau dari komitmen pimpinan, belum adanya peraturan daerah atau kebijakan yang mengatur, serta belum dituangkannya dalam program kerja pengawasan tahunan Inspektorat, juga menjadi tantangan bagi Inspektorat Kota Makassar dalam pelaksanaan *probity audit* atas pengadaan barang dan jasa.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian yang diajukan peneliti berupa masukan atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan dimasa mendatang, antara lain:

1. Diharapkan Inspektorat Kota Makassar dapat mengevaluasi pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, agar kedepannya audit yang dilakukan dapat efektif dalam mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama proses pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Makassar.
2. *Probity Audit* atas pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Makassar, sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik (khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Makassar).

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, berikut adalah saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memudahkan Inspektorat Kota Makassar dalam melaksanakan *probity audit* atas pengadaan barang dan jasa, sehingga berdampak baik dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, yaitu:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan adanya penambahan Auditor di Inspektorat Kota Makassar dan diadakannya pelatihan-pelatihan maupun bimtek secara berkala mengenai *probity audit*, dan diikuti oleh seluruh auditor.
2. Meningkatkan komitmen pimpinan, baik dari pemerintah kota untuk menerbitkan kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan *Probity Audit* atas pengadaan barang dan jasa, dan terkhusus Inspektorat Kota Makasar untuk menuangkan pelaksanaan *Probity Audit* atas pengadaan barang dan jasa dalam program kerja pengawasan tahunan, dan mengkoordinasikan ketersediaan SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Makassar.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 2015. *Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa*. *Jurnal Pengadaan*, 4(1).
- Arifah, Dista Amalia. 2012. *Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik*. *Jurnal Ekonomi*, 9(1).
- Arifyanto, D. Febri dan Kurrohman, Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Jember: Universitas Jember.
- Amiruddin, 2012. *Analisis pola pemberantasan korupsi dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2012. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-362/K/D4/2012 *Pedoman Probiti audit Pengadaan barang/jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2018. *Selayang Pandang Tentang Probiti Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
- BAE, Hari Primahadi dan Nur Aini Utami. 2017. *Analisis Penerapan Probiti Audit dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. *Jurnal Auditor*, 10(19).
- Chew, Ng and Ryan Christine. 2001. *The practice of probity audits in one Australian jurisdiction*. *Managerial Auditing Journal*, 16(2).
- Chew, Ng and Ryan Christine, 2002. *Australian Auditors-General Involvement in Probiti Auditing: Evidence and Implications*. *Managerial Auditing Journal*, 11.
- Diani, Citra Rury dan I Made narsa. 2017. *Level penalaran moral dan konflik peran: Studi eksperimen bagi model perilaku whistleblowing aparat pengawasan internal pemerintah*. *Jurnal tata kelola & akuntabilitas keuangan Negara*, 3(2).
- Dwipayani, Dewa Ayu., Gusti Ayu Purnamawati dan Putu Julianto. 2017. *Evaluasi Pelaksanaan Probiti Audit dalam Meminimalkan Risiko Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Gianyar)*. *Jurnal Akuntansi Program S1*, 8(2).

- Fuddloilulhaq, Muhammad dan Fadli usman. 2017. *Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Probit Audit pada BPKP Pusat dengan Pedoman Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jurnal Info Artha, 2(1).
- Gamar, Nur dan Djamhuri, Ali. 2015. *Auditor internal sebagai “dokter” fraud Di pemerintah daerah*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6(1).
- Hadi, Ihsan., Lilik Handayani dan Alamsyah. 2017. *Determinan Kualitas Hasil Pemeriksaan Auditor Internal Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 18(2).
- Hogan, C.E., Z. Rezaee, R.A. Riley dan U. Velury. 2008. “*Financial statement fraud: Insights from the academic literature*”. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 27(2).
- Inrianasari, Neny Tri. 2017. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono)*. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Pajak, 1(2).
- Juliani, Dian. 2014. *Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 11(2).
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2016. *Laporan Tahunan 2016*, Jakarta.
- Lily. 2015. *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh)*. Jom FEKON, 2(2).
- Mardiasmo. 2004. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Nurharjanti, Nashirotn Nisa. 2017. *Peranan panitia pengadaan barang/jasa dalam mengurangi Fraud di perguruan tinggi (studi kualitatif)*. ISSN 2460-0784.
- Nurrezkiana, Baiq., Lilik Handayani., Erna Widiastuty. 2017. *Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasi nya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 18(1).
- Novitaningrum. Badzlina Daroyani. 2014. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya)*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2(1).

- Nurhasanah. 2017. *Efektivitas Pengendalian internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi (Studi Empiris Di Kementerian/Lembaga). Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang *Standar Pemeriksa Keuangan Negara*.
- Putra, Muchammad Rizki Agung, dkk. 2015. *Analisis sistem pengadaan barang/ jasa dalam meningkatkan pengendalian intern (studi pada pt. Pembangunan jawa- bali (pjb) unit pembangkit paiton). Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2).
- Ristanti, Ni Made Asih., Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan).Jurnal Akuntansi Program S1*, 2(1).
- Rahmat. Pupu Saeful. 2009. *Penelitian Kualitatif. Equilibrium*. 5(9).
- Santoso, Urip dan Pambelum, 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. Jurnal Administarasi Bisnis*,4.
- Taufik, T. 2011. *Pengaruh Peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Riau), Jurnal Pekbis*, 3(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Ulum, Ihyaul MD, 2009. *Audit Sektor Publik*, Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Wibowa, Richo Andi. 2015. *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan?). Jurnal Anti Korupsi*, 1(1).
- Yahya, Marzuqi dan Endah Fitri Susanti. 2012. *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai dengan Perpres*, Jakarta. Laskar Aksara.

Zhao, J. S. (2005). *An Analytical Framework for Government Audit Quality Characteristics in China*. *Auditing Research*, 4.



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1:

MANUSKRIP PENELITIAN

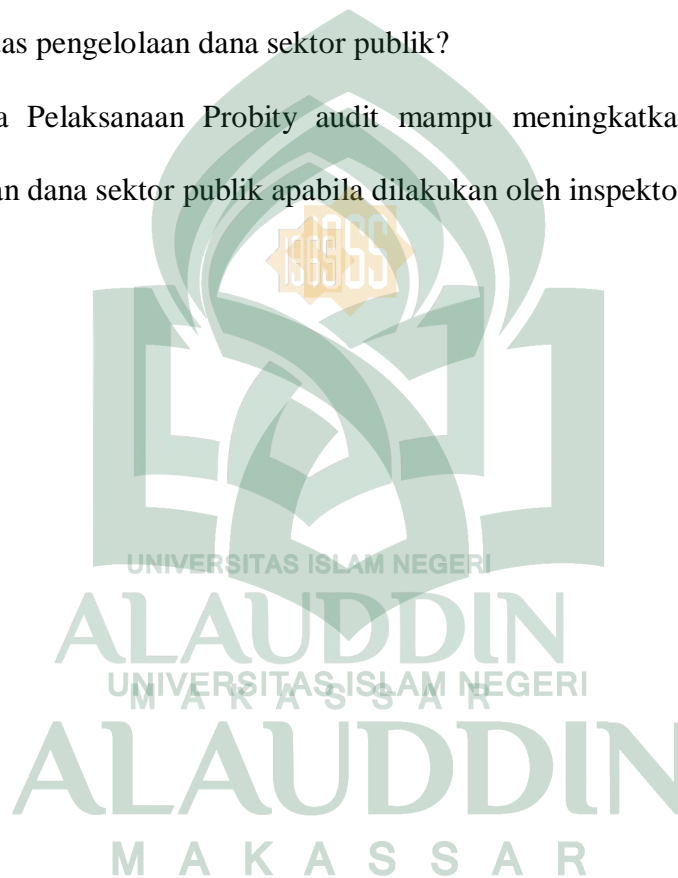
Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan jasa yang dilakukan?
2. Sejauh ini apakah pelaksanaa audit menimbulkan dampak baik atau efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik?
3. Masalah-masalah apa yang kadang di hadapi dalam proses pengauditan?
4. Apakah terkadang pada proses pengadaan terdapat spesifikasi yang berbeda antara barang yang dibeli dengan yang tertera di RKA, atau kah ada barang yang hilang? Bagaimana anda mengetahuinya dan tanggapan anda atas hal tersebut?

Probit Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa

5. Apakah Inspektorat kota Makassar telah melaksanakan Probit Audit Atas Pengadaan Barang dan Jasa?
6. Sepengetahuan bapak, Apakah *Probit Audit* atas pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan?
7. Bagaimana pemahaman atau tanggapan anda mengenai Probit Audit atas pengadaan barang dan jasa ?
8. Bagaimana kesiapan inspektorat dalam melaksanakan probity audit atas pengadaan barang dan jasa ?
9. Bagaimana kendala inspektorat terkait pelaksanaan probity audit atas pengadaan barang dan jasa?

10. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan probity audit dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah?
11. Apa harapan anda terkait pelaksanaan probity audit atas pengadaan barang dan jasa, agar kedepannya dapat diterapkan oleh inspektorat kota Makassar?
12. Apakah dengan di laksanakan Probit audit dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik?
13. Bagaimana Pelaksanaan Probit audit mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik apabila dilakukan oleh inspektorat?.



Hasil Wawancara

Informan 1

Nama : Bakhrun Silipu, ST
Jabatan : Auditor Muda
Tanggal : Selasa, 24 Juli 2018
Pukul : 10.00 Wita

1. Bagaimana pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan jasa yang dilakukan?

Informan:

Yang selama ini kami lakukan adalah *Post Audit*, yaitu audit yang dilakukan setelah kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh SKPD. Kemudian kami juga mengadakan Konsultasi kepada SKPD, yang mana biasanya SKPD datang kepada kami ketika mau melakukan pengadaan dan ketika mereka kurang paham misalkan mengenai metode apa yang akan digunakan, mereka datang bertanya, kemudian kami memberikan arahan atau saran sesuai aturan yang berlaku

2. Apakah Inspektorat kota Makassar telah melaksanakan Probity Audit Atas Pengadaan Barang dan Jasa?

Informan:

Belum pernah kami lakukan.

3. Sepengetahuan bapak, Apakah *Probity Audit* atas pengadaan barang dan jasa wajib dilakukan?

Informan:

Saya tidak mengatakan wajib, tapi seharusnya memang dilakukan.

Belum pernah dilakukan, karena memang belum ada penugasannya.

Sebenarnya dulu ada pekerjaan yang mau sekali saya lakukan *Probity Audit*, ada bangunan yang di sebelah kantor di bangun dan dari awal kami ikuti tapi kami hanya mendampingi saja bukan penugasan *Probity Audit*, karena setiap tahapannya kami tidak ikuti

4. Bagaimana pemahaman anda mengenai Probity Audit atas pengadaan barang dan jasa ?

Informan:

Probity Audit itu, audit yg mengikuti jalannya Pengadaan Barang dan Jasa, dari perencanaan, tahap persiapan, pemilihan penyedia, tahap kontrak, terus pelaksanaan pengadaan itu sendiri, sampai ke tahap penyerahan.

5. Mengapa inspektorat belum melaksanakan *probity audit* atas pengadaan barang dan jasa ?

Informan:

Belum dilakukan, karena Sumber Daya Manusia kami terbatas Cuma sekitar 20an auditor, dan waktu kami itu habis untuk melakukan *Post Audit*. Dan juga kendalanya itu waktu, karena untuk melakukan *Probity Audit* mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyerahan itu kan lama, *Post Audit* hanya memerlukan waktu sekitar 15 hari, kalau *Probity Audit* kan lama misalkan perencanaan untuk tahun ini, pekerjaannya akan dilaksanakan untuk tahun depannya, itu harus diikuti terus. Tahap penyedia saja mungkin memerlukan waktu 2 minggu, kemudian tahap pelaksanaan mungkin saja berbulan-bulan jadi prosesnya lama.

6. Menurut Bapak apakah semua auditor telah mengetahui mengenai pelaksanaan *Probity Audit*?

Informan:

Kami Cuma mendapatkan bimbingan atau diklatnya itu baru 2 orang auditor disini

7. Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan probity audit dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah?

Informan:

Seharusnya iya, karena resiko-resiko pengadaan sebelum pengadaan itu dilaksanakan sudah bisa di minimalisir dari tahap awal perencanaan. Harusnya Penyimpangan-penyimpangan yang biasanya terjadi selama proses pengadaan bisa di minimalisir.



Hasil Wawancara

Informan 2

Nama : Andry, SE.,M.Si.,Ak.,CA, AAP'A'
Jabatan : Auditor Muda
Tanggal : Selasa, 31 Juli 2018
Pukul : 10.30 Wita

1. Bagaimana pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan jasa yang dilakukan?

Informan:

Dalam Audit Pengadaan barang dan jasa yang kami sebut *Post Audit* , kami melakukan yang namanya Pemeriksaan Belanja Modal, misal dalam pembangunan gedung, prosesnya biasanya Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK bersurat kepada kami, bahwa pekerjaannya sudah selesai, dan meminta kami untuk mengaudit. Kemudian pihak Inspektorat mengeluarkan surat tugas kepada para auditor untuk melakukan pengauditan terhadap penyelesaian pembangunan gedung tersebut. Setelah dilakukannya pemeriksaan atau audit, ketika ditemukan misal adanya kekurangan volume biasanya dalam hal fisik, kami merekomendasikan kekurangan tersebut untuk disetorkan ke kas daerah atau ditindaklanjuti dengan penambahan volume. Selain permintaan langsung dari PPK, biasanya kami sendiri yang berinisiatif sendiri untuk menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan ketika hasil monitoring kami menunjukkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa tersebut beresiko tinggi. Kemudian, ketika ada pengaduan dari masyarakat bahwasanya pada pengadaan barang/ jasa tersebut terindikasi adanya *fraud*, kami tindaklanjuti dengan menerbitkan surat tugas pemeriksaan.

2. Sejauh ini apakah pelaksanaa audit menimbulkan dampak baik atau efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik?

Informan:

Dari sisi keefektifan bisa saja dikatakan efektif, namun daya jangkau kami dalam melakukan audit setelah pelaksanaan kegiatan bisa dikatakan kurang, dibanding audit dilakukan ketika masih dalam perencanaan. Contoh dalam pembangunan gedung baru, bisa saja rencana pengadaan sudah diarahkan, karena kan niat untuk melakukan *fraud* sudah ada dari awal. Ataukah misalkan pengadaan ATK, ATK sudah ada barangnya paling kita hanya bisa memeriksa ketika adanya ketidaksesuaian dengan kontrak atau surat pesanan. tapi jika diawal, contoh barangnya di pesan 100 rim kertas, kalau kita dari perencanaan, betulkah ini harus dipesan 100 rim? Bisa saja cuma 50 gitu loh, jadi itukan lebih efektif dan efisien. Dibanding dia sudah terlaksana, dia sudah pesan 100, ujung-ujungnya yang digunakan cuma sekitar 80, 20 nya kan tidak efisien, tapi tetap kita harus memeriksa yang dipesan 100 dan barangnya juga harus 100.

3. Bagaimana pemahaman atau tanggapan anda mengenai Probitry Audit atas pengadaan barang dan jasa ?

Informan:

Memang salah satu poin krusial dalam pengelolaan dana sektor publik itu yaitu diproses pengadaan barang dan jasa. Biasanya Fraud di pengadaan barang dan jasa itu kan terjadi mulai dari awal tahap perencanaan, karena memang niat pastinya sudah direncanakan dari awal. Salah satu fungsi dari *Probitry Audit* itu, yah bisa meminimalisir *fraud* ketika kita mulai

mendampingi dari tahap perencanaan, sampai implementasi atau sampai dengan penyelesaian pengadaan.

4. Menurut bapak apa keunggulan dari *Probit Audit* , dibanding audit pengadaan barang dan jasa lainnya?

Informan:

Keunggulan dari *Probit Audit* yaitu bisa berfungsi sebagai *Early Warning System* atau deteksi dini, karena disini kita mendampingi proses pengadaan pertahapan, dari tahap awal sampai tahap akhir. Ketika kita sudah mulai mengidentifikasi adanya indikasi-indikasi *fraud* di setiap tahapan-tahapan tersebut, kita bisa langsung menindaklanjuti, di banding dengan sudah direncanakan sudah dilaksanakan sudah selesai proses pengadaan baru kita turun ke lapangan, tentukan istilahnya ini Nasi sudah jadi bubur, itulah yang membedakan antara *Post Audit* dengan *Probit Audit*.

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai Pelaksanaan Probit audit mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik apabila dilakukan oleh inspektorat?.

Informan:

Secara khusus di pengadaan barang dan jasa, mungkin bisa lebih akuntabel, dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik khususnya dana-dana atas pengadaan barang dan jasa karena setiap tahapan audit yang dilakukan juga dapat memberikan jaminan dan keyakinan kita terhadap akuntabilitas per tahapan pengadaan barang dan jasa. Pada intinya bisa

6. Bagaimana kendala inspektorat terkait pelaksanaan probity audit atas pengadaan barang dan jasa?

Informan:

Kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan *probity audit* itu, yang pertama keterbatasan sumber daya manusia kami, jumlah auditor kami di Inspektorat masih minim cuma sekitar 20an. Nah terus kami kan sudah punya program yang namanya program kerja pengawasan tahunan, yang dimana itu sudah menggunakan sumber daya yang tersedia, pada saat kita mau melaksanakan probity audit, tentu kita merencanakannya terlebih dahulu pada program kerja pengawasan tahunan kami, nah itu belum direncanakan sampai tahun ini

7. Apa harapan anda terkait pelaksanaan probity audit atas pengadaan barang dan jasa, agar kedepannya dapat diterapkan oleh inspektorat kota Makassar?

Informan:

Harapan saya sebelum mempersiapkan melaksanakan probity audit ini, kita perlu meningkatkan kualitas dari para auditor yang akan melaksanakan probity audit, jadi itu menjadi poin penting peningkatan kualitas SDM. Auditor wajib di ikutkan diklat maupun bimtek-bimtek terkait dengan *probity audit*.

8. Bagaimana Komitmen pimpinan terkait pelaksanaan *Probity Audit*?

Informan:

Pada dasarnya sebuah pemerintahan yang baik pasti akan berkomitmen mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana sektor

publik, tapi yah khusus di Inspektorat kota Makassar Pimpinan kami dalam hal ini kepala Inspektorat itu mempunyai komitmen untuk bisa melaksanakan *Probit Audit* ini, cuma dengan adanya kendala-kendala yang seperti sudah saya kemukakan tadi, seperti SDM dan belum direncanakannya di program kerja pengawasan tahunan kami, maka tahun ini kami belum bisa melakukan tapi mungkin tahun depan kami sudah mulai merencanakan.

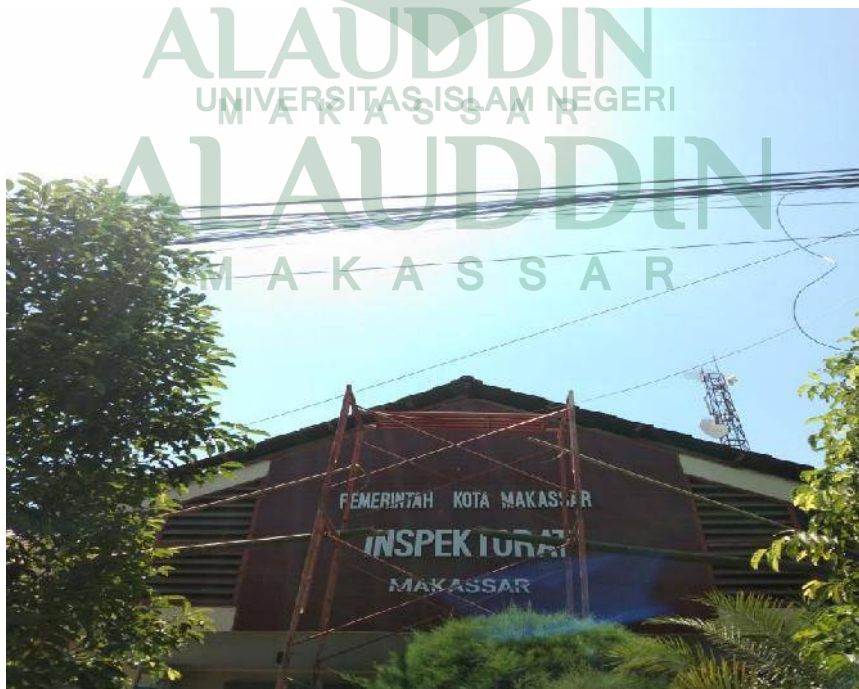
Yah harapan saya, kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan *probit audit* ini bisa dituangkan dan direncanakan dalam program kerja pengawasan tahunan, dan disertai dengan anggaran yang memadai terkait dengan pelaksanaan *probit audit* ini.



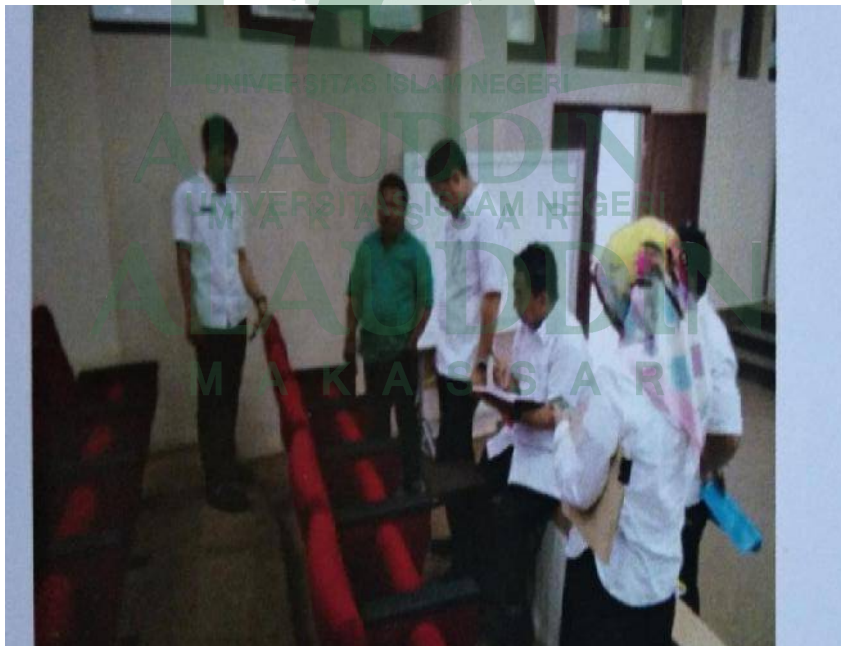
Lampiran 2:

Dokumentasi penelitian





Dokumentasi kegiatan pemeriksaan belanja modal



Sumber: Profil Inspektorat Kota Makassar 2017

Dokumentasi kegiatan monitoring barang persediaan



Sumber: Profil Inspektorat Kota Makassar 2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 4770 /EB.I/PP.00.9/06/2018

Samata, 28 Juni 2018

Lamp : -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada,

Yth. UPT P2T BKPM

Di –

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Firda Utama**
NIM : 90400114115
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Mamoa 5C

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya **“Pelaksanaan Probit Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sektor Publik (Studi pada Inspektorat Kota Makassar)”**

Dengan Dosen pembimbing:
1. **Mustakim Muchlis, SE., M.Si., Ak.**
2. **Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Inspektorat Kota Makassar**.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

01111119584022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di SamataGowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9158/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 4770/EB.I/PP.00.9/06/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : FIRDA UTAMA
Nomor Pokok : 90400114115
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 63, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**"PELAKSANAAN PROBITY AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA SEKTOR PUBLIK (STUDI PADA
INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR)"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Juli s/d 09 Agustus 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 02 Juli 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 11 Juli 2018

K e p a d a

Nomor : 070 / 7257 -II/BKBP/VII/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. **KEPALA INSPEKTORAT
KOTA MAKASSAR**

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala 9158/S.01/PTSP/2018 Tanggal 02 Juli 2018,
Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : **FIRDA UTAMA**
NIM / Jurusan : 90400114115/ Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin
Alamat : Jl.H.M.YASIN Limpo No. 63, Makassar
Judul : **"PELAKSANA PROBITY AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG
DAN JASA DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA SEKTOR PUBLIK (STUDI PADA
INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam
rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan
mulai tanggal **11 Juli s/d 09 Agustus 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui**
dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan
bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

a.n. **WALIKOTA MAKASSAR**
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.AP

Pangkat : Pembina

NIP : 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsin



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR INSPEKTORAT

Jalan Teduh Bersinar No. 07 Komp. Griya Fajar Mas, Makassar Kode Pos : 90224
Telepon. (0411) 881550, Fax. (0411) 8215755
E-mail: inspektorat_makassar@yahoo.com



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

SURAT KETERANGAN Nomor : 2299/Insp/070/VIII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : FIRDA UTAMA
NIM / Jurusan : 90400114115 / Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas UIN Alauddin

Telah melaksanakan Penelitian di Inspektorat Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat dari Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Nomor : 070/7257-II/BKBP/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, dalam rangka Penelitian Skripsi dengan judul:

“ PROBITY AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA : TANTANGAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA SEKTOR PUBLIK (STUDI PADA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR) ”.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 13 Agustus 2018

An. INSPEKTUR
Sekretaris,

DAHIAL, S.Sos. M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19730905 199303 1 007

Tembusan :

1. Arsip.

RIWAYAT HIDUP



FIRDA UTAMA, lahir di Mamara, Kabupaten Luwu pada tanggal 12 Desember 1997. Penulis merupakan anak sulung dari tiga bersaudara, buah hati dari Ayahanda Saliman dan Ibunda Nasmiani. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 112 Mamara pada tahun 2002 hingga tahun 2008, kemudian

penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri 3 Lamasi pada tahun 2008 hingga tahun 2011. Pada tahun tersebut penulis juga melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA Negeri 1 Walenrang dan selesai pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi dan menyelesaikan studi pada tahun 2018.

Contact Person:

Email : firdautama@gmail.com

No. Hp: 085-240-788-866